

PDRRB

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Pengeluaran
2010-2014

tahun dasar 2010

<http://bangkatinggah.kab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

Merkant Pengeluaran

2010-2014

tahun dasar 2010

<http://bangkatengahkab.bps.go.id>



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANGKA TENGAH MENURUT PENGELUARAN 2010-2014

ISBN : 978-602-0966-20-5

Nomor Publikasi : 19040.1509

Nomor Katalog : 9302002.1904

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 77 halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Desiminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : DEWI SAVITRI,S.ST, M.SI

Editor : DEWI SAVITRI,S.ST, M.SI

Penulis : KUSMANTO,SE

Design Layout : FARIDATUSH SHOLIAH AHYARI, S.ST

<http://bangkatengahkalibps.go.id>

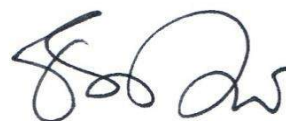
KATA PENGANTAR

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran merupakan produk baru dari BPS kabupaten/kota seluruh Indonesia dan rilis secara serentak tahun 2015. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran menggunakan tahun dasar 2010 dan tahun data penghitungan dimulai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Publikasi ini menyajikan informasi dalam bentuk tabel, gambar serta analisa deskriptif serta memberikan gambaran tentang komposisi penggunaan barang dan jasa dalam memenuhi permintaan akhir seperti konsumsi, investasi, serta neraca perdagangan untuk kurun waktu 2010-2014, selain itu juga disajikan perkembangan agregat PDRB.

Publikasi ini masih sangat jauh dari sempurna, saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dimasa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Koba, November 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bangka Tengah



Dewi Savitri, S.ST, M.Si
NIP. 19780930 200012 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Manfaat PDRB Menurut Pengeluaran	4
Bab II Metodologi dan Sumber Data	5
2.1. Konsumsi Rumahtangga	6
2.2. Konsumsi Lembaga Non Pofit.....	8
2.3. Konsumsi Pemerintah.....	14
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	19
2.5. Perubahan Inventori.....	25
2.6. Ekspor Impor Barang dan Jasa.....	28
Bab III Tinjauan Perekonomian berdasarkan PDRB Kab Bangka Tengah Menurut Pengeluaran	33
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran	34
3.2. Perkembangan Konsumsi Rumahtangga.....	41
3.3. Perkembangan Konsumsi Lembaga Non Profit	47
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	49
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	52
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori.....	54
3.7. Perkembangan Ekspor dan Impor	56

Bab IV	Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran	59
4.1.	PDRB	60
4.2.	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Terhadap Ekspor Barang dan Jasa	62
4.3.	Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto	63
4.4.	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	64
4.5.	Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB	65
4.6.	Neraca Perdagangan	66
4.7.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	68
Bab V	Penutup	69

<http://bangkatengahkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah),2010-2014	36
Tabel 3.2. Distribusi PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),2010-2014	37
Tabel 3.3. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah),2010-2014	38
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),2011-2014	39
Tabel 3.5. Perkembangan Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014	42
Tabel 3.6. Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bangka Tengah(persen),2010-2014	43
Tabel 3.7. Pertumbuhan Ril Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bangka Tengah(persen),2011-2014	44
Tabel 3.8. Laju Implisit Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bangka Tengah(persen),2011-2014	46
Tabel 3.9. Perkembangan Komponen Lembaga Non Profit Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014	48
Tabel 3.10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014	50
Tabel 3.11 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014	52
Tabel 3.12 Perkembangan Perubahan Inventori Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014	55
Tabel 3.13 Perkembangan Ekspor dan Impor Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014	57
Tabel 4.1. PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014.....	61

Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Rumahtangga Terhadap Ekspor Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014.....	62
Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Rumahtangga Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014.....	63
Tabel 4.4. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014.....	64
Tabel 4.5. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014.....	65
Tabel 4.6. Neraca Perdagangan Barang dan jasa Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014.....	67
Tabel 4.7. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Bangka Tengah,2010-2014.....	69

<http://bangkatengahkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2010-2014.....	35
Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2011-2014	40
Gambar 3.3 Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2011-2014	41
Gambar 3.4 Peranan dan Pertumbuhan Lembaga Non Profit Kabupaten Bangka Tengah(persen), 2010-2014.....	48
Gambar 3.5 Peranan dan Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah(persen), 2010-2014.....	50
Gambar 3.6 Peranan dan Pertumbuhan PMTB Kabupaten Bangka Tengah(persen), 2010-2014.....	53
Gambar 3.7 Pertumbuhan riil Ekspor dan Impor Kabupaten Bangka Tengah(persen), 2010-2014.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta rupiah), 2010-2014	74
Tabel 2. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Juta rupiah), 2010-2014	74
Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2010-2014	75
Tabel 4. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen), 2010-2014	75
Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2010-2014	76
Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen), 2010-2014	76
Tabel 7. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2010-2014	77
Tabel 8. Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2010-2014	77

Bab 1

Pendahuluan

<http://bangkajengahkab.bps.go.id>

Bab. I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi secara makro dan menjelaskan keterkaitan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kegiatan perekonomian tersebut. Selain itu, PDRB merupakan ukuran kinerja suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan buku panduan *System of National Accounts (SNA)* yang berlaku secara internasional. Dari angka PDRB dapat digambarkan laju pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, perubahan struktur ekonomi, pendapatan per kapita, konsumsi akhir, investasi dan variabel ekonomi makro lainnya.

PDRB Menurut lapangan usaha mencerminkan tentang tingkat produktivitas suatu daerah/wilayah, data tersebut menjelaskan tentang kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output(produk) serta dalam menciptakan nilai tambah.

Sementara, PDRB menurut Pengeluaran lebih menggambarkan tentang bagian dari produk regional yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, pembentukan modal serta yang diekspor. Lebih jauh, PDRB dari sisi pengeluaran dapat pula diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam menggunakan pendapatannya untuk keperluan konsumsi maupun untuk tabungan, yang merupakan sumber investasi domestic (dilihat dari aspek moneter). Transaksi ekspor dan impor lebih menggambarkan tentang kemampuan daerah dalam menciptakan pendapatan yang berasal dari transaksi perdagangan dengan wilayah lain, termasuk luar negeri.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, serta adanya perkembangan dan perubahan ekonomi Indonesia, penyusunan PDRB terus mengalami penyempurnaan, terutama dari segi cakupan data dan metodologi

penghitungan yang digunakan. Tahun 2000 dipilih sebagai tahun dasar baru karena kondisi perekonomian pada tahun tersebut relatif stabil dan merupakan awal berlangsungnya proses pemulihan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997. Berdasarkan saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai perubahan tahun dasar agar dilakukan minimal sepuluh tahun sekali, maka tahun 2010 merupakan tahun yang cukup relevan sebagai tahun dasar baru untuk penghitungan PDRB menurut lapangan usaha dan pengeluaran.

Perubahan Tahun dasar yang berbasis SNA 2008 dijadikan titik awal bagi kabupaten/kota untuk melakukan penghitungan PDRB menggunakan pendekatan Pengeluaran. Angka PDRB menurut pengeluaran akan dirilis pada bulan November 2015 dalam bentuk Publikasi. Dalam penghitungan PDRB Menurut Pengeluaran menggunakan Tahun dasar 2010, untuk itu BPS Kabupaten Bangka Tengah melakukan penghitungan PDRB yang dipandu oleh BPS Provinsi Kep Bangka Belitung. Series data yang dihitung adalah tahun 2010-2014.


1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penyajian PDRB menurut penggunaan adalah :


- (1) Untuk menyatakan komposisi penggunaan barang dan jasa baik yang dihasilkan di dalam daerah maupun yang berasal dari daerah lain termasuk impor dari luar negeri, untuk memenuhi permintaan berupa:
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, termasuk pengeluaran lembaga swasta nirlaba
 - b. Pengeluaran konsumsi pemerintah
 - c. Pembentukan modal tetap bruto
 - d. Perubahan stok
 - e. Ekspor neto, yaitu ekspor dikurang impor
- (2) Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan di bidang perekonomian daerah.

1.3. Manfaat PDRB Menurut Pengeluaran

Tersedianya data PDRB menurut penggunaan secara baik, lengkap dan berkesinambungan dapat memberikan gambaran atau fenomena ekonomi tentang perilaku konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diperoleh informasi tentang surplus/defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri. Dari PDRB menurut penggunaan ini dapat diturunkan beberapa data indikator makro, diantaranya analisis tingkat kecenderungan konsumsi marjinal (*marginal propensity to consume*), **ICOR** (*Incremental Capital Output Ratio*), rasio pembentukan modal tetap terhadap konsumsi dan sebagainya.



Bab 2
Metodologi dan
Sumber Data



<http://bairukata.go.id/kab.bps.go.id>

Bab. II Metodologi dan Sumber Data

2.1 Konsumsi Rumahtangga

Sektor institusi dalam total ekonomi dikelompokkan ke dalam lima sektor yaitu, korporasi finansial, korporasi non finansial, pemerintahan umum, rumahtangga dan LNPRT. Rumahtangga mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan besarnya sumbangan nilai konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDB penggunaan. Rumahtangga bisa berperan sebagai konsumen, produsen dan penyedia faktor produksi. Rumahtangga sebagai konsumen sangat berperan dalam penghitungan konsumsi rumahtangga

2.1.1 Konsep Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

2.1.2 Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik penduduk yang bersangkutan. Barang dan jasa yang dikonsumsi antara lain dalam bentuk:

- makanan dan minuman, baik bahan makanan maupun makanan jadi termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa atau kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
- bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- barang tahan lama, seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dsj.), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dsj.), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- jasa-jasa, seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dsj.), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus, dsj.), ongkos transport, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket tempat rekreasi, ongkos pembantu rumah tangga;
- barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;

- pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- barang dan jasa yang dibeli secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk di luar wilayah atau di luar negeri termasuk sebagai konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai transaksi impor; sedangkan pembelian langsung oleh bukan penduduk di suatu wilayah diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah yang bersangkutan (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak ada duplikatnya (tidak diproduksi kembali), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lain diperlakukan sebagai investasi barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

Diperhitungkannya nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa sewa rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang diperhitungkan adalah ongkos sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga tidak termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh pengeluaran yang dimaksud antara lain adalah pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Demikian halnya pengeluaran rumah tangga untuk keperluan transfer dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.3 Klasifikasi

Berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh institusi rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam 12 (dua belas) kelompok COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*), yaitu:

1. Makanan dan Minuman Tidak Beralkohol
2. Minuman Beralkohol, Tembakau dan Narkotik
3. Pakaian dan Alat Kaki
4. Perumahan, Air, Listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, Perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan Kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

2.1.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi besarnya PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas; BPS), dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu (sebulan) untuk kelompok makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Banyaknya penduduk tahunan,
- Data Sekunder (baik dari BPS maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu.
- IHK

2.1.5 Metode Estimasi

Penghitungan PKRT selama ini didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena data pengeluaran rumah tangga dari Susenas cenderung *underestimate* khususnya untuk kelompok bukan makanan dan makanan jadi, maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai yang diperoleh dari berbagai sumber di luar Susenas. Cara yang dilakukan adalah menggantikan (*me-replace*) hasil Susenas dengan hasil penghitungan data sekunder atas komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Asumsinya, bahwa penghitungan data sekunder lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas akan menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga (adh) berlaku. Untuk memperoleh konsumsi rumah tangga harga konstan 2010, PKRT harga berlaku terlebih dahulu dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP. Konsumsi rumah tangga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dengan deflator IHK 12 kelompok COICOP yang sesuai.

2.2 Konsumsi LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga (LNPRT) adalah bagian dari sektor institusi yang memberikan gambaran dari seluruh proses ekonomi dan peran yang dilakukan oleh beberapa sektor dalam ekonomi. Sektor institusi dalam total ekonomi dikelompokkan ke dalam lima sektor yaitu, korporasi finansial, korporasi non finansial, pemerintahan umum, rumahtangga dan LNPRT. LNPRT menyediakan barang dan jasa kepada anggotanya dan rumahtangga secara gratis atau atas harga ekonomi yang tidak berarti secara ekonomi.

2.2.1 Konsep Definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP) secara keseluruhan. Sesuai dengan fungsinya LNP terdiri dari LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud LNPRT adalah lembaga yang menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada harga yang tidak berarti secara ekonomi kepada anggotanya atau rumahtangga dan tidak dikontrol oleh pemerintah . Harga yang tidak berarti secara ekonomi adalah harga yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang produsen ingin sediakan dan pada jumlah yang pembeli ingin beli.

Aturan praktis untuk mengidentifikasi apakah harganya berarti secara ekonomi adalah ketika harganya menutup setengah dari biaya produksi. Jika tidak maka harganya merupakan harga yang tidak berarti secara ekonomi sehingga barang dan jasa yang disediakan berbasis non-pasar.

Ciri-ciri unit lembaga nonprofit adalah sbb:

- ❖ lembaga nonprofit umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- ❖ pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga;
- ❖ setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- ❖ kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- ❖ istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada kegiatan sejenis.

2.2.2 Cakupan

Lingkup LNP yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi (Orprof), perkumpulan sosial/kebudayaan/olah raga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi, dan terdiri dari:

- ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.
- ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila
- ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita, dan
- ormas lainnya seperti Kosgoro, Partai Politik, dan Pepabri.

b. Organisasi Sosial (Orsos)

Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, dan terdiri dari panti asuhan, panti wreda, panti lainnya, seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.

c. Organisasi Profesi (Orprof)

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat, dan terdiri dari:

- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Sosial, seperti: ISEI, Ikatan Akuntan Indonesia, dan sejenisnya.
- Organisasi profesi dalam bidang Ilmu Pasti, seperti PII, IDI, dan sejenisnya.

d. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi

Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial, dan terdiri dari:

- Perkumpulan sosial seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, WIC;
- Organisasi Kebudayaan seperti Padepokan Seni dan Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan
- Organisasi Olahraga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia
- Organisasi Hobi seperti Ikatan Penggemar Anggrek, ORARI, dan Wanadri.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya, dan terdiri dari:

- LSM Penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi;
- LSM Pendidikan dan Pelatihan seperti LP3ES, Yayasan Bina Swadaya;
- LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI;
- LSM Penelitian dan Studi Kebijakan seperti Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia

f. Lembaga Keagamaan

Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama, dan terdiri dari:

- Organisasi Islam, seperti Lembaga Dakwah, Remaja Masjid, Majelis Taklim;
- Organisasi Kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP;
- Organisasi Hindu/Budha seperti Walubi, Parisadha Hindu Dharma;
- Perkumpulan Jamaah Masjid;
- Perkumpulan Jemaat Gereja/tempat ibadah lain;
- Pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.

g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama, solidaritas, dan terdiri dari:

- Lembaga Bantuan Kemanusiaan, seperti Yayasan Kesejahteraan Gotong Royong, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat;
- Lembaga Bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar;
- Lembaga Bantuan Lainnya

2.2.3 Klasifikasi

a. LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi

Kelompok LNP ini mencakup LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi dengan pungutan biaya (iuran) dalam menutup biaya penyediaan jasa yang dimaksud. Tingkat biaya atau harga keanggotaan termasuk dalam kriteria harga yang berarti secara ekonomi (*economically significant price*). Jasa yang dihasilkan biasanya dijual pada anggota, dan diperlakukan sebagai konsumsi antara. LNP semacam ini umumnya dalam bentuk asosiasi yang menyediakan jasa khususnya bagi anggota. Sebagian besar LNP didirikan oleh korporasi yang dirancang untuk kepentingan promosi. Contoh : kamar dagang, asosiasi produsen pertanian, manufaktur atau perdagangan, organisasi pengusaha penelitian dan pengujian laboratorium atau organisasi lain, atau lembaga yang terlibat dalam aktivitas untuk kepentingan umum atau bermanfaat bagi kelompok yang mengontrol keuangannya.

b. LNP yang dikontrol oleh pemerintah

Kelompok LNP ini mencakup LNP yang dikontrol oleh pemerintah dan menjual jasanya pada tingkat harga yang berbasis non-market, yaitu pada tingkat harga yang tidak didasarkan atas biaya produksi. Bahkan terkadang jasa layanan diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Kontrol atas LNP didefinisikan sebagai kemampuan untuk menentukan kebijakan dan program lembaga. Dalam menentukan apakah suatu LNP dikontrol pemerintah, ada lima indikator yang harus dipertimbangkan sbb :

- Penunjukan petugas, pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola LNP berdasarkan konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lain
- Instrumen lain, instrumen yang berisi ketentuan selain penunjukan petugas yang memungkinkan pemerintah menentukan aspek penting dari kebijakan umum atau program LNP
- Perjanjian kontrak, keberadaan perjanjian kontrak antara pemerintah dan LNP ini memungkinkan pemerintah menentukan aspek kunci dari kebijakan umum atau program LNP
- Tingkat pembiayaan, LNP yang utamanya dibiayai oleh pemerintah dapat dikontrol oleh pemerintah. Secara umum, jika LNP dapat menentukan kebijakan atau program yang berarti sepanjang garis yang tersebut pada indikator sebelumnya, maka tidak dianggap dikontrol oleh pemerintah
- Eksposur risiko, jika pemerintah secara terbuka dimungkinkan untuk terkena semua atau sebagian besar risiko finansial terkait dengan aktivitas LNP, maka pengaturan tersebut merupakan kontrol.

c. LNP yang menyediakan barang dan jasa ke rumahtangga

Kelompok LNP ini dapat dibedakan atas :

- LNP yang menyediakan barang dan jasa ke rumahtangga dengan tingkat harga yang berarti secara ekonomi. Output LNP merupakan pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga.
- LNP yang menyediakan jasa ke rumahtangga secara gratis atau dengan tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi (non-komersial). Output LNP ini merupakan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dan pengeluaran akhir aktual rumahtangga.
- LNP yang menyediakan jasa kolektif secara gratis atau dengan tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Output LNP ini merupakan pengeluaran konsumsi akhir aktual LNPRT. Jasa kolektif biasanya

dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, contoh hasil penelitian LNPRT yang dapat diakses setiap orang, administrasi publik baik tingkat nasional maupun daerah, dll. Di dalam teori ekonomi, jasa kolektif disebut sebagai barang publik (public goods).

2.2.4 Sumber Data

Sumber data untuk menghitung PKLNPRT tahunan adhb terdiri dari:

- Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis input pengeluaran.
Data ini berasal dari Survei Khusus Lembaga Non-profit dengan sampling unit LNPRT dan lag survey satu tahun (SKLNP 2011 merupakan data LNPRT 2010). Survei ini dilaksanakan setiap tahun di beberapa propinsi, untuk propinsi yang terkena sampel dapat menggunakan data tersebut dalam penghitungan. Sedangkan untuk propinsi yang tidak terkena sampel, maka dapat digunakan hasil SKLNP propinsi lain yang karakteristik LNPRT-nya mirip.
- Populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
Populasi LNPRT menurut jenis lembaga dapat diperoleh dari Kesbanglinmas setempat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Departemen agama dan kantor lain yang mempunyai informasi mengenai jumlah organisasi di wilayahnya. Untuk propinsi yang terkena sampel SKLNP dapat menggunakan data hasil up-dating direktori LNPRT.

2.2.5 Metode Estimasi

a. PKLNPRT tahunan adhb

Dengan asumsi tidak ada kegiatan ekonomis produktif yang dilakukan lembaga, maka nilai PKLNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan lembaga dalam rangka melakukan kegiatan layanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT¹ sama dengan nilai konsumsi (antara) ditambah biaya primer (upah & gaji pegawai, penyusutan barang modal, dan pajak tak langsung). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang/jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). Jika lembaga menggunakan *input* yang diperoleh secara cuma-cuma dari pihak lain, maka nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku.

Estimasi PKLNPRT dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung. Metode ini didasarkan pada data hasil survei khusus lembaga nonprofit rumah tangga (SKLNP). Tahapan estimasi PKLNPRT sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata PKLNPRT menurut kode lembaga dan input
Nilai rata-rata ini diperoleh dari SKLNP yang dilaksanakan setiap tahun, namun sampel survey tidak meliputi seluruh propinsi yang Indonesia. Sehingga untuk propinsi yang tidak terpilih sebagai sampel pada tahun tertentu maka dapat digunakan pendekatan dengan cara menggunakan data SKLNP propinsi lain yang karakteristik LNPRT-nya mirip dengan propinsi tersebut. Rumus rata-rata per lembaga menurut jenis pengeluaran dari hasil survey:

¹ Biaya produksi LNPRT sama dengan konsumsi akhir LNPRT

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata PKLNPRRT menurut kode lembaga dan input

x_{ij} : PKLNPRRT hasil survey menurut kode lembaga dan input

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut kode lembaga

i : Kode lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Input LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Estimasi PKLNPRRT

Setelah mendapatkan nilai rata-rata PKLNPRRT menurut kode lembaga dan input dari hasil survey dan populasi LNPRT menurut kode lembaga di provinsi masing-masing, maka estimasi PKLNPRRT dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PKLNPRRT adhb

N_i : Populasi LNPRT menurut kode lembaga

b. PKLNPRRT atas dasar harga konstan (adhk)

PKLNPRRT tahunan adhk dihitung dengan cara menjumlahkan PKLNPRRT triwulanan adhk, rumusnya adalah:

$$Y = Y_{Q1} + Y_{Q2} + Y_{Q3} + Y_{Q4}$$

Y : PKLNPRRT tahunan adhk

Y_{Q1} : PKLNPRRT adhk triwulan I

Y_{Q2} : PKLNPRRT adhk triwulan II

Y_{Q3} : PKLNPRRT adhk triwulan III

Y_{Q4} : PKLNPRRT adhk triwulan IV

2.3 Konsumsi Pemerintah

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan baik sebagai konsumen, produsen, dan sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Dalam *System of National Accounts* (SNA) 2008, disebutkan bahwa unit pemerintah merupakan unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Di peran di atas, pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Di dalam SNNI, sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD). Sebagaimana diketahui bahwa APBN/APBD berisi uraian tentang seluruh pendapatan dan belanja pemerintah, serta transfer pemerintah baik ke pemerintah yang lebih rendah, ke rumah tangga, maupun ke perusahaan dalam bentuk dana perimbangan, transfer sosial, maupun subsidi.

2.3.1 Konsep Definisi

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Untuk sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan output pemerintah. Untuk itu PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 1968, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup aktivitas :

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi 46 *Pedoman Penyusunan PDRB Kab/Kota Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran* karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya

yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, yaitu :

- a. Berdasarkan apakah barang atau jasa diproduksi oleh produsen pasar atau non-pasar.
- b. Berdasarkan apakah pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran kolektif atau individu.
- c. Berdasarkan fungsi (COFOG /*Classification of the Functions of Government*).
- d. Berdasarkan jenis barang dan jasa (CPC/*Central Product Classification*).

Berdasarkan konsep dan definisi di atas, maka aktivitas ekonomi yang dilakukan pemerintah dapat dihitung melalui sisi pengeluaran maupun sisi produksi. Dari sisi produksi, yang dihitung adalah nilai tambah bruto (NTB)-nya. NTB sektor pemerintahan dihitung dengan menjumlahkan nilai balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan barang modal yang digunakan di dalam aktivitas produksinya.

Konsep dan definisi yang terkait dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan pemerintah dari sisi produksi adalah sbb :

- Neraca produksi pemerintah, merupakan suatu tabel yang memuat berbagai transaksi yang terkait dengan aktivitas produksi yang dilakukan pemerintah. Neraca produksi terbagi menjadi dua sisi, sisi sumber dan sisi penggunaan. Sisi sumber menjelaskan output yang dihasilkan oleh pemerintah. Sedangkan sisi penggunaan menjelaskan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan aktivitas produksi-nya. NTB merupakan item penyeimbang dalam neraca produksi pemerintah.
- Output pemerintah, output pemerintah merupakan output non- pasar. Output non-pasar adalah output dalam bentuk barang dan jasa, yang dihasilkan oleh institusi yang tidak berorientasi pada keuntungan, seperti LNPRT dan pemerintah. Ke dua institusi ini menyediakan barang dan jasa secara gratis atau pada harga yang tidak signifikan secara ekonomi. Output non-pasar *Pedoman Penyusunan PDRB Kab/Kota Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran 47* dibagi menjadi output non-pasar untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual. Output non-pasar untuk dijual mencakup nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah, yang disediakan secara gratis atau pada harga yang tidak signifikan secara ekonomi pada institusi lain. Sedangkan output non-pasar yang dikonsumsi sendiri mencakup output yang dihasilkan pemerintah, yang digunakan sendiri oleh pemerintah (konsumsi pemerintah).
- Biaya antara merupakan nilai pemakaian barang tak-tahan lama serta jasa yang digunakan sebagai input dalam menghasilkan output pemerintahan. Biaya antara pemerintah terdiri dari : (1) belanja barang (belanja barang, biaya pemeliharaan, dan perjalanan dinas); (2) belanja bantuan sosial; serta (3) belanja lain-lain.
- NTB sektor pemerintah terdiri dari:
 - Belanja pegawai;
 - Surplus Usaha = 0;

- Pajak Tak Langsung Neto = 0;
- Penyusutan.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adalah

Nilai output bruto minus penjualan barang dan jasa dari kegiatan pemerintah untuk :

- Pelayanan publik (Public administration)
- Jasa pendidikan
- Jasa kesehatan
- Kegiatan lain yang dilakukan pemerintah

2.3.2 Cakupan

Pengeluaran konsumsi pemerintah dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. Pengeluaran konsumsi pemerintah untuk individu

pengeluaran yg diberikan kepada individu (jasa kesehatan, pendidikan, social security, sports, rekreasi, kebudayaan, dsb)

2. Pengeluaran konsumsi untuk kolektif

pengeluaran pemerintah untuk penduduk secara keseluruhan-barang publik- (administrasi publik, pertahanan , keamanan, infra-struktur & pembangunan ekonomi, R& D dsb.)

Pengeluaran Pemerintah meliputi:

- Administrasi umum
- Pelayanan pemerintah (gratis atau hampir gratis) seperti pendidikan, kesehatan serta jasa lainnya.
- Lembaga Non-profit yg utamanya dikontrol dan dibiayai oleh pemerintah
- Pengeluaran pemerintah sbg transfer berupa barang
- Belanja/pembelian makanan/minuman oleh pemerintah untuk membantu korban bencana

Klasifikasi Ekonomi Konsumsi Akhir pemerintah meliputi :

- Konsumsi antara
- Balas jasa TK
- Konsumsi barang modal
- Penjualan (output pasar/market output)
- Transfer berupa barang
- Own account capital formation
- Gross capital formation (purchased) Subsidies
- Property income
- Social benefits other than in kind
- Transfer berjalan lainnya
- Transfer modal/kapital

2.3.3 Klasifikasi

Klasifikasi Pemerintah menurut COFOG (*Classification of Function of Government*) :

1. Jasa pemerintahan umum
2. Pertahanan
3. Keamanan (*Public order and safety*)
4. Perekonomian
5. Pelestarian Alam/Lingkungan (*Environmental protection*)
6. Perumahan dan pelayanan masyarakat
7. Kesehatan
8. Rekreasi, budaya dan agama
9. Pendidikan
10. Jaminan sosial

2.3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan konsumsi pemerintah meliputi :

- Data pengeluaran pemerintah pusat di kabupaten/kota;
- Data pengeluaran pemerintah provinsi di kabupaten/kota;
- Data APBD kabupaten/kota;
- Data statistik keuangan desa (K-3);
- IHPB umum tanpa ekspor;
- Jumlah pegawai menurut golongan;

2.3.5 Metode Estimasi

Estimasi Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah adalah

$GFCE = \text{Total Output non pasar} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social Transfer in-kind} + \text{Output Bank Indonesia}$

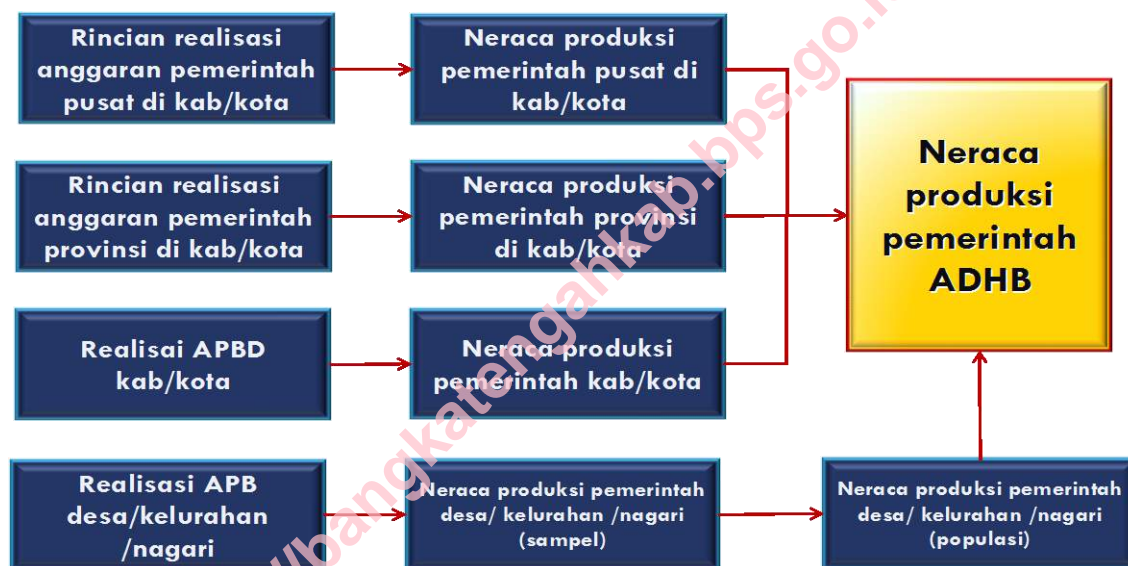
Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Untuk menghitung konsumsi pemerintah Kab/Kota adh Berlaku, dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah (Kab/Kota itu sendiri) dengan (seluruh desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kab/Kota) ditambah (pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kab/Kota yang bersangkutan) dan (pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kab/Kota yang bersangkutan).

Untuk memudahkan dalam penghitungan PK-P Kab/Kota adh Berlaku, perlu disusun neraca produksi dari pemerintah Kab/Kota sbb :

INPUT	OUTPUT
1. Biaya Antara (A) 2. NTB (B)=B1+B2 2.1.Penyusutan (B1) 2.2.Belanja Pegawai (B2)	3. Output (C) 3.1.Output non pasar (D) = C-E 3.2.Output pasar (E)
Total Input=A+B=C	Total Output (C)

Alur penghitungan konsumsi akhir pemerintah :



Pengeluaran konsumsi pemerintah Kab/Kota adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi.

Untuk menghitung PK-P adh Konstan 2010, baik Tahunan maupun Triwulanan, langkah yang dilakukan adalah sbb :

- Biaya antara adh Konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yakni membagi biaya antara adh Berlaku (t) dengan IHPB umum tanpa ekspor (t) (2010=100) dikalikan 100. Data IHPB umum tanpa ekspor didapatkan dari Subdit Harga Perdagangan Besar, BPS RI. Data dasar IHPB umum tanpa ekspor dengan tahun dasar 2007 *direferencing* untuk mendapatkan IHPB umum tanpa ekspor tahun dasar 2010.
- NTB adh Konstan dihitung dengan metode deflasi. Untuk Belanja Pegawai menggunakan indeks upah sedangkan penyusutan menggunakan indeks implisit PMTB.
- Output adh Konstan = Biaya antara adh Konstan + NTB adh Konstan.
- Output non-pasar barang dan jasa yang dijual adh Konstan dihitung dengan metode deflasi. Output non-pasar barang dan jasa yang dijual adh Konstan (2010=100) = (Output non-pasar barang dan jasa yang dijual adh Berlaku (t)/ihk umum) x 100.

- PK-P adh Konstan = output adh Konstan – output non-pasar barang dan jasa yang dijual adh Konstan + social transfer in kind – purchased market production + output Bank Indonesia.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

PMTB merupakan nilai arus barang modal yang terjadi akibat penambahan barang modal baru dikurangi pengurangan barang modal bekas, ditambah perbaikan besar atas barang modal atau aset tetap dan biaya transfer/pemindahan kepemilikan atas aset-aset yang tak diproduksi. Sedangkan perubahan inventori merupakan perubahan kuantitas bahan baku, penolong, barang jadi dan setengah jadi maupun suku cadang yang di kuasai perusahaan..

Dalam Penghitungan PMTB sangat ditentukan oleh kondisi aset tetap. Aset tetap merupakan aset penting yang menunjang kegiatan produksi yang digunakan berulang kali atau berkelanjutan dalam proses produksi lebih dari satu tahun dan bernilai relatif mahal. Aset tetap secara garis besar dikelompokan sebagai berikut : bangunan dan kontruksi, mesin, kendaraan, ternak, tumbuhan, dan barang modal lainnya. Penambahan fixed aset atau yang dikenal sebagai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada prinsipnya diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh pada suatu kegiatan ekonomi. Sehingga penghitungan PMTB menjadi sangat penting untuk mengukur efisiensi yang dicapai suatu aktifitas ekonomi di suatu negara.

2.4.1 Konsep Definisi

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.2 Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) berwujud baik baru maupun bekas seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & peralatannya, sistem persenjataan, asset yang di budidayakan, produk kekayaan intelektual, alat transportasi dan lainnya;

2. Biaya pemindahan kepemilikan atas asset *non financial* yang tidak diproduksi, seperti tanah dan asset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar asset yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai asset (antara lain reklamasi pantai, pembukaan hutan, pengeringan dan pengairan hutan, dan pencegahan banjir dan erosi);
4. Penambahan dapat terjadi karena pembelian, produksi, barter, transfer, *financial leasing*, pertumbuhan asset yang dibudidayakan, dan perbaikan besar aset;
5. Pengurangan dapat terjadi karena penjualan, barter, transfer atau *financial lease*. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan;

2.4.3 Klasifikasi

Secara umum pengklasifikasian barang modal dapat dilakukan menurut 4 penggolongan, antara lain :

A. Klasifikasi Menurut Jenis Barang.

Pengklasifikasian menurut jenis barang ini akan menjadi bentuk laporan PMTB triwulanan. Klasifikasi barang modal menurut jenis dibagi menjadi 4 kelompok besar antara lain: **bangunan, mesin, peralatan transportasi**, dan **lainnya**. Adapun rincian barang yang tercakup antara lain:

1. Bangunan

- a) **Bangunan tempat tinggal**; meliputi penyiapan lahan tempat tinggal, konstruksi gedung tempat tinggal, serta instalasi perlengkapan bangunan tempat tinggal.
- b) **Bangunan bukan tempat tinggal**; terdiri dari penyiapan lahan, konstruksi, dan instalasi bangunan. Jenis-jenis bangunan bukan tempat tinggal antara lain: gedung perkantoran, bangunan industri, gedung pusat perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung penginapan, gedung tempat hiburan dan bangunan untuk rekreasi.
- c) **Prasarana Pertanian**; Meliputi bangunan yang digunakan untuk menunjang pertanian seperti bangunan pengairan.
- d) **Jalan & jembatan**; Terdiri dari bangunan jalan raya, jalan kereta api, jembatan, tanggul, landasan pesawat, dan bangunan dermaga.
- e) **Instalasi Listrik, Air, Gas & Komunikasi**; Meliputi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air bersih, air limbah dan drainase, bangunan elektrikal, konstruksi telekomunikasi, sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai, konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, konstruksi elektrikal dan telekomunikasi lainnya, pembuatan/pengeboran sumur air tanah, instalasi listrik bangunan sipil, instalasi navigasi laut dan sungai, instalasi navigasi udara, instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api, instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, dan instalasi telekomunikasi.
- f) **Instalasi Pipa Gas dan Minyak**; Meliputi Bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan minyak & gas.
- g) **Konstruksi lainnya**; terdiri dari pengerukan sungai, pembuatan taman kota, instalasi meteorologi dan geofisika, mercusuar, konstruksi pengeboran lepas pantai, dan lainnya.

2. **Mesin;** terdiri dari:
 - a) **Mesin pembangkit & penggerak mula;** Meliputi mesin motor penggerak mula seperti mesin uap, turbin gas, turbin air, motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, motor listrik, mesin pengubah arus, mesin pengubah tegangan, generator, dan sejenisnya.
 - b) **Mesin dan perlengkapannya;** mesin pertanian, mesin-mesin untuk industri, mesin cetak, mesin penjilidan, mesin pengolahan dan pengerjaan kayu, mesin metalurgi, mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, dll.
 - c) **Mesin pengolah data** seperti komputer, mesin hitung elektronik, *cash register*, dan sejenisnya.
 - d) **Peralatan elektronik;** terdiri dari berbagai peralatan listrik untuk rumahtangga, peralatan kedokteran, alat rekaman suara, gambar dan sejenisnya, tabung dan katup elektronik, dan lainnya.
 - e) **Peralatan komunikasi;** telepon, pemancar radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitter, peralatan faksimili, kamera televisi, dan berbagai alat transmisi lainnya.
 - f) **Peralatan listrik lainnya;** lampu ultra violet, dsb.
3. **Peralatan Transportasi;**
 - a) **Kendaraan bermotor roda 2 & 3;** misal: motor, bemo, mobet, dsb.
 - b) **Kendaraan bermotor roda 4 dan lebih;** meliputi kendaraan untuk penumpang maupun untuk industri.
 - c) **Kereta api,** termasuk juga kereta api yang tidak mengangkut penumpang.
 - d) **Kapal laut;** terdiri dari bermacam-macam kapal dan perahu baik yang bermotor maupun tidak.
 - e) **Pesawat terbang;** termasuk helikopter, pesawat penumpang dan barang.
 - f) **Kendaraan dan alat angkut lainnya;** mencakup sepeda dan becak, trolley, gerobak, delman, kereta dorong, dan lainnya.
4. **Barang Modal Lainnya,** yang dikelompokkan menjadi : Aset tak berwujud, *cultivated asset*, dan lainnya.
 - a) Aset tak berwujud terdiri dari : Eksplorasi mineral, perangkat lunak, Barang seni & Literatur adalah produksi yang asli dari kekayaan intelektual, Aset tak berwujud lainnya; seperti hak cipta, hak paten, waralaba, merk dagang, dsb.
 - b) *Cultivated Asset* terdiri dari : Ternak besar, ternak kecil, tumbuhan menghasilkan.
 - c) Lainnya terdiri dari : Barang-barang dari kayu, rotan dan bambu, Peralatan dari logam, Barang-barang dari kain dan kulit, Peralatan kedokteran dan kesehatan, Peralatan laboratorium, instrumen optik, dan alat ukur, Alat musik dan peralatan studio, peralatan olahraga, barang-barang dari mineral nonlogam, barang-barang dari plastik, dsb.

B. Klasifikasi barang modal menurut lapangan usaha/sektor

Penggolongan ini memperlihatkan barang modal sebagai salah satu faktor produksi yang dimiliki dan dikuasai oleh sektor-sektor tersebut untuk melakukan kegiatan produksinya. Jenis dan ragam barang modal yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing sektor sangat tergantung pada jenis aktivitas produksi yang dilakukan. Sebagai contoh barang modal di sub-sektor peternakan dapat mencakup bangunan kantor, bangunan kandang, ternak penghasil, mesin pemerah susu, mesin penetas, kendaraan, dan lain-lain; Barang modal pada sub-sektor transportasi dapat mencakup bangunan kantor, bandara, pesawat terbang, kereta api, kendaraan roda empat, dan sebagainya.

C. Klasifikasi barang modal menurut institusi pemilik atau pelaku ekonomi

Institusi pemilik atau pelaku ekonomi pemilik atau penguasa barang modal terdiri dari :Pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Usaha Swasta, Rumahtangga, Lembaga Nirlaba.

1. Pemerintah berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan umum baik didaerah maupun pusat. Pengeluaran pemerintah untuk barang modal meliputi pengeluaran untuk pembangunan gedung kantor, pembangunan rumah dinas, gedung sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, kendaraan dinas, komputer, dan lain-lain.
2. BUMN/BUMN dan Badan Usaha Swasta melakukan kegiatan Produksi baik barang maupun jasa . Penguasaan barang modal diantaranya Bangunan Kantor,lapangan terbang, kereta api, pesawat terbang, jaringan listrik, jaringan distribusi air, bangunan pabrik, gudang penyimpanan, peralatan kantor, mesin pabrik, kendaraan roda empat, dsb.
3. Rumahtangga sebagai rumahtangga murni menguasai barang modal berupa rumahtinggal. Namun sebagai rumah tangga usaha juga menguasai beberapa jenis barang modal yang digunakan dalam proses produksi.
4. Lembaga non profit dalam melakukan kegiatannya dapat menguasai barang modal jenis bangunan, kendaraan, peralatan kantor, peralatan peraga, dan sebagainya.

D. Kalsifikasi Barang Modal Menurut Wilayah Asal barang

Penggolongan ini mengkategorikan wilayah asal barang yang dimiliki atau dikuasai berbagai lapangan usaha dan pelaku ekonomi didalam negeri., yang terbagi atas:

1. Produksi dalam negeri atau domestik, yaitu PMTB yang berasal dari barang modal baru produksi dalam negeri (wilayah domestik suatu negara), diantaranya meliputi bangunan, mesin-mesin, sarana transportasi, ternak, dan lain-lain.
2. Produksi negara lain (impor) yaitu PMTB yang berasal dari produksi luar negeri baik bekas maupun baru. Yang diantaranya meliputi mesin-mesin, sarana tranportasi, ternak, dan lain-lain.

2.4.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PMTB adalah

- Output bangunan dari Neraca Industri

- Nilai Barang modal impor dan nilai impor barang yang menjadi barang modal 2 digit HS dari Statistik Distribusi Perdagangan Luar Negeri.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & RT.
- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari Stat. Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan & Penggalan (Migas & Non Migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum .
- Publikasi Statistik Kontruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.
- Statistik Perkebunan. Ditjen Perkebunan
- Statistik Penambahan Kendaraan, Samsat

2.4.5 Metode Estimasi

Estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi produksi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal pada berbagai sektor produksi, atau disebut juga sebagai pendekatan "arus komoditi". Penyediaan atau "supply" barang modal tersebut bisa berasal dari produk dalam negeri maupun produk luar negeri (impor).

a. Pendekatan secara langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, yang di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya untuk transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang berkaitan dengan pengadaan barang modal tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi/data tentang pembentukan modal tetap bruto (perubahan atas harta tetap, yang dinilai atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan), pada setiap sektor. Untuk memperoleh nilai pembentukan modal atas dasar harga konstan, pembentukan modal (ADHB) tersebut di "deflate" dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar yang sesuai dengan masing-masing kelompok jenis barang modalnya.

b. Pendekatan secara tidak langsung

Penghitungan pembentukan modal dengan cara tidak langsung disebut juga sebagai pendekatan melalui arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatannya adalah dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

Estimasi penghitungan PMTB berupa mesin, angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor. Bagi barang modal yang berasal dari dalam negeri diperoleh dengan dua cara, yaitu pertama dengan mengalokasikan output mesin, angkutan serta barang modal lainnya yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan sehingga diperoleh nilai PMTB atas dasar harga pembelian (ADHB). Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan mendeflate PMTB (ADHB) dengan IHPB yang sesuai dengan masing-masing jenis barang modal. Pendekatan kedua yang dapat dilakukan apabila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan nilai harga konstan dengan indeks produksi barang modal yang relevan. Untuk itu estimasi PMTB diawali dengan menghitung nilai harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh nilai berlakunya, nilai (ADHK) tersebut di "reflate" dengan menggunakan indeks harga masing-masing kelompok jenis barang modal sebagai inflatornya. Ini mensyaratkan bahwa nilai harga konstan pada tahun-tahun sebelumnya harus sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan nilai PMTB yang berupa mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya yang berasal dari impor diperoleh melalui 2 (dua) cara.

Pertama nilai PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari nilai total barang impor. Lalu barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utamanya seperti mesin-mesin, moda angkutan dan barang modal lainnya. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokatornya (barang modal impor menurut kode SITC 2 digit). *Kedua* untuk memperoleh nilai PMTB (ADHK) tersebut adalah dengan cara men"deflate" estimasi PMTB (ADHB) dengan menggunakan deflator dari indeks harga yang sesuai.

Penghitungan barang modal tidak berwujud seperti eksplorasi mineral ADHB dihitung dengan cara mengalikan suatu rasio terhadap output sektor pertambangan, sedangkan untuk mendapat ADHKnya dengan mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit sektor pertambangan. Perangkat lunak ADHB dihitung dengan cara mengalikan suatu rasio terhadap output sektor jasa perusahaan sedangkan untuk mendapat ADHKnya dengan mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit sektor jasa perusahaan. Penghitungan hiburan, kesusasteraan dan kesenian asli dibedakan atas yang berasal dari domestik dan impor. Penghitungan yang berasal dari domestik dengan mengalikan suatu rasio terhadap output sektor jasa hiburan, sedangkan untuk yang berasal dari impor dengan cara mengalikan suatu rasio terhadap barang modal impor. Untuk mendapatkan PMTB ADHKnya

dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan masing-masing indeks harganya, yaitu indeks implisit sektor jasa hiburan dan indeks harga barang impor

Sementara apabila melakukan penghitungan melalui pendekatan tidak langsung (Arus Barang), akan ditemui beberapa permasalahan seperti :

- a. Rasio penggunaan output sektor yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaikinya diperlukan survei dalam skala besar.
- b. Nilai *Trade and Transport Margin (TTM)* sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi dari sumber data terlalu lama.

2.5 Perubahan Inventori

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi selain tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam wilayah suatu region. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Sehingga ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.1 Konsep Definisi

Inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses atau belum selesai diproses atau belum terjual sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif)

Persediaan/inventori memiliki 6 fungsi yaitu :

1. Mengantisipasi permintaan konsumen
2. Memasangkan produksi dengan distribusi
3. Mengambil keuntungan dari potongan harga
4. Melakukan *hedging* terhadap inflasi dan perubahan harga
5. Menghindari kekurangan stok karena cuaca, kekurangan pasokan, masalah mutu, atau pengiriman yang tidak tepat
6. Menjaga agar operasi berlangsung dengan baik

2.5.2 Cakupan

Merupakan aset perusahaan paling mahal, yang mencerminkan 40 % total modal yang diinvestasikan.

Pada prinsipnya inventori merupakan :

- Persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain
- Persediaan yang berasal dari pihak lain, yang akan digunakan sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut

2.5.3 Klasifikasi

Klasifikasi inventori menurut jenis barang dapat dibedakan atas :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual; i. Ternak untuk tujuan dipotong;
6. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
7. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang-barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4 Sumber Data

Sumber data dalam penghitungan perubahan inventori :

- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistic pertambangan dan penggalian
- Data komoditas perkebunan
- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait
- Indeks harga implisit PDB sektoral terpilih
- IHPB terpilih
- Data eksternal lainnya seperti data persediaan beras dari Bulog, ternak dari Dinas pertanian dan peternakan, data stok perdagangan dari dinas perindustrian dan perdagangan dan sebagainya.

2.5.5 Metode Estimasi

Metode yang dapat digunakan dalam penghitungan perubahan inventori adalah dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan yakni dari sisi "korporasi" atau unit usaha sebagai pendekatan "langsung" dan dari

sisi "komoditi" sebagai pendekatan tidak langsung. Dilihat dari sisi manfaatnya pendekatan secara langsung akan menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditi hanya dapat dilakukan jika data tentang posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan. Proses penghitungan dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

i. Pendekatan langsung

Dengan pendekatan langsung memungkinkan untuk diperoleh nilai posisi inventori pada waktu-waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Sumber data utama yang dapat digunakan adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku maka diperlukan data inventori pada tahun –tahun yang berurutan. Langkah-langkah penghitungan perubahan inventori dari laporan keuangan, yaitu :

- ✓ Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan dengan mendeflate stok awal dan akhir persediaan dengan IHPB akhir tahun.
- ✓ Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangi posisi inventori tahun t dengan tahun t-1 dan
- ✓ Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflasi perubahan inventori harga konstan dengan data IHPB rata-rata tahun.

ii. Pendekatan tidak langsung

Pendekatan tidak langsung atau yang sering kali disebut juga dengan pendekatan arus komoditi (*commodity flow*). Data utama yang dibutuhkan adalah data tentang volume dan harga dari masing-masing barang inventori.

Nilai inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal barang inventori dikalikan rata-rata harga pembelian atau rata-rata harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan inventori harga konstan dihitung dengan mendeflate nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, atau mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga tahun dasar.

2.6 Ekspor Impor

Aktivitas ekspor-impor kabupaten/kota di Indonesia diyakini sudah terjadi sejak dulu kala, yaitu sebelum daerah ini disebut sebagai kabupaten/kota. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara penuh akan berusaha mendatangkan dari daerah/negara lain. Pada sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik juga terdorong memperluas pasar ke luar daerah bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, maka produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi juga semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lancar. Kondisi tersebut mendorong aktifitas ekspor-impor barang dan jasa di kabupaten/kota semakin berkembang.

Secara umum, aktivitas ekspor-impor kabupaten/kota lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan ekspor-impor nasional ke luar negeri. Faktor yang membuat transaksi ekspor-impor kabupaten/kota ini lebih mudah di antaranya adalah:

- transaksi ekspor dan impor antar kabupaten/kota tidak memerlukan perijinan tertentu dan tidak dikenai tarif impor ataupun pajak ekspor;
- jarak antar daerah relatif lebih dekat; dan
- faktor selera masyarakat relatif sama.

Dilihat dari sisi partner transaksi, ekspor-impor kabupaten/kota dapat dilakukan dengan negara lain (ekspor-impor luar negeri) dan atau kabupaten/kota lain (ekspor-impor antar kabupaten). Dengan kondisi ini membuat transaksi ekspor-impor kabupaten/kota menjadi punya peran yang besar dalam pembentukan PDRB kabupaten/kota. Besarnya peran ekspor-impor kabupaten/kota terhadap PDRB diyakini lebih besar dibandingkan peran ekspor-impor nasional terhadap PDB. Peran ekspor-impor kabupaten/kota juga diyakini punya peran yang relatif besar dibandingkan komponen lain dalam membentuk PDRB kabupaten/kota.

2.6.1 Konsep Definisi

Ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen kabupaten/kota dengan pelaku ekonomi non-residen yang berasal dari luar kabupaten/kota baik Indonesia maupun luar negeri (*United Nations*, 2009: 56).

Pada dasarnya metode pengukuran jenis transaksi eksternal (baik antar negara maupun antar daerah) memiliki kesamaan prinsip, dalam artian yang satu akan menambah jumlah PDRB dan yang lainnya akan mengurangi jumlah PDRB. Perbedaan yang sangat mendasar adalah dalam hal penilaian, karena menyangkut alat pembayaran.

2.6.2 Cakupan

Cakupan transaksi ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota sama dengan cakupan transaksi ekspor-impor nasional ke luar negeri, yang membedakan hanya mitra transaksinya. Dalam ekspor-impor barang dan jasa nasional ke luar negeri, yang menjadi mitra adalah residen luar negeri, sedangkan dalam ekspor-impor kabupaten/kota yang menjadi mitra adalah residen kabupaten/ kota lain di Indonesia dan luar negeri.

2.6.3 Sumber Data

Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa nasional ke luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota belum tersedia data yang sesuai dengan konsep dan definisi SNA. Sumber data yang tersedia hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota pada tahun dasar 2010 menjadi sulit dilakukan secara langsung.

Sumber data ekspor-impor untuk tingkat provinsi yang tersedia selama ini di antaranya adalah:

- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang; dan
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.

Dalam penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota, sumber data yang ada akan digunakan sebagai data pendukung hasil penghitungan dengan metode tak-langsung.

Sumber data yang digunakan dalam metode tak-langsung adalah :

- Struktur input;
- Struktur permintaan akhir menurut komoditas;
- Nilai tambah bruto ADHB;
- Koefisien heterogenitas; dan
- IHPB menurut jenis barang dan IHK jasa-jasa (kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan).

2.6.4 Metode Estimasi

Metode penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota terdiri dari penghitungan untuk data tahun 2010, tahun 2011, dan seterusnya, atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Penghitungan atas dasar harga berlaku (ADHB)

Penghitungan ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota tahun 2010 dilakukan dengan metode tak-langsung, yaitu metoda *cross hauling*. Metode tersebut akan menghasilkan nilai ekspor-impor barang dan jasa suatu kabupaten/kota. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) komoditas barang dan jasa di setiap perekonomian.

Penghitung ekspor impor dengan metoda *cross-hauling* didahului dengan metoda *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah suatu metode penghitungan ekspor-impor barang dan jasa dengan memanfaatkan tabel input-output "bayangan". Dalam metode ini transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) di dalam keseimbangan *demand* dan *supply* perekonomian. Apabila *supply* domestik komoditas di suatu kabupaten/kota melebihi kebutuhan untuk permintaan antara (proses produksi) dan permintaan akhir, maka kabupaten/kota tersebut mengalami surplus, dan akan mengekspor. Sebaliknya, apabila *supply* domestik komoditas di suatu kabupaten/kota tidak ada atau kurang cukup untuk memenuhi keperluan permintaan antara dan permintaan akhir, maka kabupaten/kota tersebut akan mengimpor (Kronenberg, 2008).

Asumsi yang digunakan dalam metode *commodity balance* adalah kelebihan dan kekurangan *supply* domestik terhadap *demand* sepenuhnya diselesaikan dengan ekspor dan impor. Apabila terjadi kelebihan *supply* domestik, maka akan mengekspor sedangkan kekurangan *supply* domestik akan mengimpor. Hal ini membuat hasil penghitungan ekspor-impor belum menangkap aspek lain dalam transaksi ekspor-impor, karena dalam kenyataannya baik dalam kondisi kelebihan atau kekurangan *supply* komoditas domestik, suatu kabupaten/kota dapat melakukan transaksi ekspor dan impor secara bersama-sama. Untuk mengatasi kelemahan ini, penghitungan ekspor-impor barang dan jasa di kabupaten/kota perlu disempurnakan lagi dengan mengadopsi metode *cross hauling*.

Metode *cross hauling* berusaha mengatasi kelemahan yang ada dari metode *commodity balance* dengan mengakomodir kemungkinan suatu kabupaten/kota melakukan ekspor-impor komoditas barang dan jasa secara bersamaan. Misalkan, suatu kabupaten/kota selain mengekspor komoditas yang merupakan output sektor pertanian ke luar daerah/luar negeri juga melakukan impor untuk komoditas yang merupakan output pertanian dari luar daerah/luar negeri.

Langkah yang dilakukan dalam melakukan penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode *commodity balance* adalah sbb :

1. menyusun struktur input masing-masing sektor PDRB dengan bantuan tabel input-output yang tersedia;
2. mengalikan nilai tambah bruto (NTB) menurut industri dengan rasio output terhadap NTB;
3. mengalikan struktur input pada langkah (1) dengan output yang dihasilkan langkah (2), di mana dari proses ini menghasilkan biaya antara, nilai tambah bruto dan output dalam kerangka tabel input-output bayangan;
4. menyusun struktur komponen permintaan akhir dengan bantuan tabel input-output yang ada;
5. mengalikan nilai masing-masing komponen permintaan akhir dengan struktur pada langkah (4);
6. menghitung nilai ekspor neto (*trade balance*), yang merupakan selisih output (*supply* domestik) dengan permintaan domestik (permintaan antara tambah permintaan akhir domestik);
7. apabila net ekspor bernilai positif maka diasumsikan sebagai ekspor, sedangkan negatif diasumsikan sebagai impor;

8. menjumlahkan nilai ekspor dan impor menurut komoditas pada langkah (7) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

Selanjutnya langkah yang dilakukan dalam penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota dengan metode *cross hauling* adalah sama dengan langkah yang dilakukan pada metode *commodity balance* sampai langkah ke (6). Penyesuaian yang dilakukan adalah untuk langkah (7), sehingga urutannya menjadi:

1. melakukan langkah (1) s/d (6) seperti pada penghitungan dengan metode *commodity balance*;
2. menghitung koefisien heterogenitas² berdasarkan data pada tabel input output yang tersedia, yaitu *trade volume* dikurangi nilai absolut *trade balance*. Hasilnya dibagi dengan penjumlahan output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
3. menghitung nilai volume perdagangan (*trade volume*), yaitu menjumlahkan nilai absolut *trade balance* dengan hasil perkalian antara koefisien heterogenitas dan total atau jumlah output, permintaan antara, dan permintaan akhir domestik;
4. nilai impor setiap komoditas diperoleh dengan *trade volume* dikurangi *trade balance*, hasilnya dibagi dua;
5. nilai ekspor setiap komoditas diperoleh dengan menjumlahkan *trade balance* dan impor;
6. menjumlahkan nilai ekspor dan impor menurut komoditas pada langkah (5) untuk mendapat nilai ekspor dan impor.

Metoda *cross hauling* mengandalkan struktur input dan permintaan akhir, nilai tambah setiap industri, dan permintaan akhir domestik setiap komponen, serta koefisien heterogenitas setiap komoditas yang didasarkan pada data yang tersedia dan hasil dari proses penghitungan sebelumnya. Penghitungan dengan metode *commodity balance* akan menghasilkan nilai ekspor-impor provinsi yang lebih rendah dibandingkan dengan hasil metode *cross hauling*. Akurasi hasil penghitungan setiap item tersebut akan menentukan akurasi nilai ekspor-impor provinsi yang dihasilkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar hasil penghitungan ekspor-impor kabupaten/kota ini menjadi berkualitas, terutama dengan menyesuaikan struktur input dan permintaan akhir serta koefisien heterogenitas yang lebih sesuai dengan kondisi di kabupaten/kota untuk referensi waktu penghitungan, dan melakukan pemeriksaan hasil penghitungan dengan membandingkan dengan data sekunder ekspor-impor yang relevan.

² Semakin heterogen komoditas di suatu sektor mengakibatkan nilai koefisien heterogenitasnya tinggi dan membuat fenomena aktivitas ekspor-impor komoditas secara bersamaan menjadi semakin besar nilainya. Contoh penghitungan koefisien heterogenitas dapat dilihat pada Tabel 7.

Penghitungan atas dasar harga konstan (ADHK)

Penghitungan ekspor-impor antar kabupaten/kota atas dasar harga konstan dilakukan dengan metode deflasi, dengan deflator IHPB dan IHK.

Uraian deflator yang digunakan untuk adalah sbb :

Rincian	Deflator
1. Ekspor barang	IHPB menurut jenis barang
2. Ekspor jasa	IHK jasa
3. Impor barang	IHPB menurut jenis barang nasional/provinsi mitra utama
4. Impor jasa	IHK jasa nasional/ provinsi mitra utama

Karena indeks harga yang berperan sebagai deflator tidak menggunakan tahun dasar 2010, maka sebelum digunakan, tahun dasar indeks harga tersebut harus digeser terlebih dahulu menjadi 2010. Metode yang digunakan dikenal dengan istilah *referencing*, yaitu nilai indeks pada tahun 2010 dirubah menjadi 100,00 sedangkan periode yang lain digerakkan dengan perubahan indeks yang ada.



Bab 3

Tinjauan

Perekonomian



<http://bangentengahkab.bps.go.id>

Bab. III

Tinjauan Perekonomian Berdasarkan PDRB Pengeluaran

Proses pembangunan ekonomi berdampak pada perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sementara faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan sebagai akibat peningkatan transaksi perdagangan. Perkembangan ekonomi dapat diukur menggunakan 2 (dua) pendekatan PDRB yaitu Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran. Dalam bab ini akan dibahas tinjauan perekonomian Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan pendekatan PDRB Menurut Pengeluaran.

Setiap komponen pengeluaran yang mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Penjelasan rinci tentang perilaku masing-masing komponen pengeluaran tersebut akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. Tinjauan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagaimana pendapatan yang diciptakan dalam proses ekonomi dari berbagai sektor produksi digunakan masyarakat untuk konsumsi akhirnya. Dengan kata lain PDRB pengeluaran ini menjelaskan mengenai penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir atau output akhir (*final output*). Pengguna konsumsi akhir ini adalah rumah

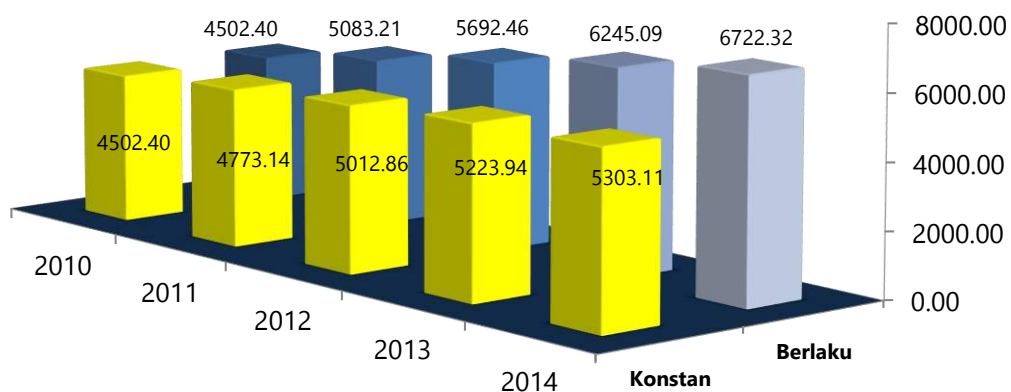
tangga, pemerintah, lembaga-lembaga non profit pelayan rumah tangga serta sektor produksi di wilayah domestik.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB mengalami peningkatan sekitar 524 miliar rupiah per tahunnya. begitu juga untuk harga konstan, kenaikan PDRB sekitar 220 miliar rupiah per tahunnya.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan struktur perekonomian regional berdasarkan permintaan akhir tiap komponen dalam sistem perekonomian terbuka dalam suatu wilayah. Sedangkan PDRB Atas Harga Konstan menggambarkan perkembangan ekonomi suatu wilayah setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, PDRB Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah berjalan dengan lancar.

Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (miliar Rupiah), 2010-2014



Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB yang tercipta pada tahun 2010 sebesar 3 639 miliar rupiah dan mengalami peningkatan cukup tinggi di tahun 2014 yaitu sebesar 6 722,32 miliar rupiah. Hal ini tentunya terkait dengan pergerakan harga yang

mempengaruhi besaran PDRB. Begitu juga berdasarkan harga konstan juga mengalami peningkatan dari 4.502,40 miliar rupiah pada tahun 2010 menjadi 5,303,11 di tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi perkembangan PDRB adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan.

3.1.1. Struktur PDRB Menurut Pengeluaran

Struktur PDRB Menurut Pengeluaran dibentuk oleh 6 (enam) komponen, yaitu konsumsi rumahtangga, lembaga non profit, pemerintah, PMTB, perubahan inventori, Ekspor neto atau ekspor dikurangi impor.

Tabel 3.1. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rp), 2010-2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 469	2 716	3 035	3 457	3 902
2. Konsumsi LNPRT	23	26	31	36	42
3. Konsumsi Pemerintah	425	510	595	697	801
4. PMTB	898	1 025	1 158	1 332	1 557
5. Perubahan Inventori	179	171	158	172	82
6. Ekspor	3 477	3 831	3 637	3 620	4 009
7. Impor	2 969	3 195	2 920	3 069	3 670
PDRB	4 502	5 083	5 692	6 245	6 722

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Jika dilihat besaran nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing komponen selama kurun waktu tahun 2010 - 2014, maka perekonomian Bangka Tengah didominasi oleh kompoenen konsumsi rumahtangga yang memiliki peranan paling

besar dalam pembentukan PDRB. Komponen berikutnya yang memiliki nilai tambah cukup besar adalah PMTB. Sedangkan nilai tambah yang paling rendah dimiliki oleh komponen lembaga non profit dan berarti komponen ini distribusi terhadap pembentukan PDRB paling kecil. Disisi lain, neraca perdagangan Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan posisi surplus dimana nilai ekspor lebih tinggi dari impor.

Tabel 3.2. Distribusi PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),2010-2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	54,83	53,43	53,31	55,36	58,05
2. Konsumsi LNPRT	0,50	0,52	0,54	0,57	0,63
3. Konsumsi Pemerintah	9,45	10,04	10,45	11,16	11,91
4. PMTB	19,95	20,16	20,33	21,33	23,16
5. Perubahan Inventori	3,98	3,35	2,77	2,75	1,22
6. Ekspor Neto	11,28	12,51	12,60	8,83	5,04
PDRB	54,83	53,43	53,31	55,36	58,05

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Pada tabel 3.2 terlihat bahwa selama periode 2010-2014, produk yang dihasilkan sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga yaitu diatas 54 persen sehingga komponen tersebut memiliki peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Bangka Tengah. Komponen berikutnya adalah pengeluaran investasi fisik (PMTB dan inventori) yang memiliki peranan diatas 20 persen selama periode tersebut. Untuk pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, peranannya sekitar 9-11 persen. sementara, untuk net ekspor peranannya selama kurun waktu 2010-2014 kecenderungannya menurun dimana pada tahun 2010 sebesar 11 persen dan ditahun 2014 hanya 5 persen, Hal ini menunjukkan bahwa komoditi unggulan yang diekspor

keberadaannya sudah semakin menurun. Sedangkan komponen yang peranannya sangat kecil adalah lembaga non profit yang peranannya dibawah 1 persen selama kurun waktu tersebut.

3.1.2. Perkembangan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Nilai PDRB atas harga konstan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik, begitu juga untuk komponen pembentuknya. Selama kurun waktu 2010-2014, besaran nilai tambah dari seluruh komponen pembentuk PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali net ekspor yang berfluktuatif.

Tabel 3.3. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 (miliar Rp), 2010-2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 469	2 579	2 708	2 880	3 075
2. Konsumsi LNPRT	23	25	26	28	31
3. Konsumsi Pemerintah	425	472	515	564	613
4. PMTB	898	960	1 016	1 093	1 186
5. Perubahan Inventori	179	146	125	124	60
6. Ekspor	3 477	3 675	3 227	3 118	3 263
7. Impor	2 969	3 084	2 604	2 584	2 926
PDRB	4 502	4 773	5 013	5 224	5 303

*Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara*

Jika dilihat pada tabel 3.3, nilai PDRB atas harga konstan lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai PDRB atas harga berlaku. Hal ini disebabkan adanya pengaruh perubahan harga dalam penghitungan PDRB harga berlaku, sedangkan dalam penghitungan PDRB harga konstan pengaruh faktor harga dihilangkan.

Disisi lain, Agregat makro yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Untuk melihat perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah, rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen), 2011-2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,47	5,00	6,36	6,76	4,47
2. Konsumsi LNPRT	9,42	6,87	6,80	9,74	9,42
3. Konsumsi Pemerintah	11,08	9,04	9,50	8,70	11,08
4. PMTB	6,82	5,82	7,65	8,51	6,82
5. Perubahan Inventori	-18,59	-14,39	-0,60	-51,71	-18,59
6. Ekspor Neto	16,37	5,32	-14,28	-36,77	16,37
PDRB	6,01	5,02	4,21	1,52	6,01

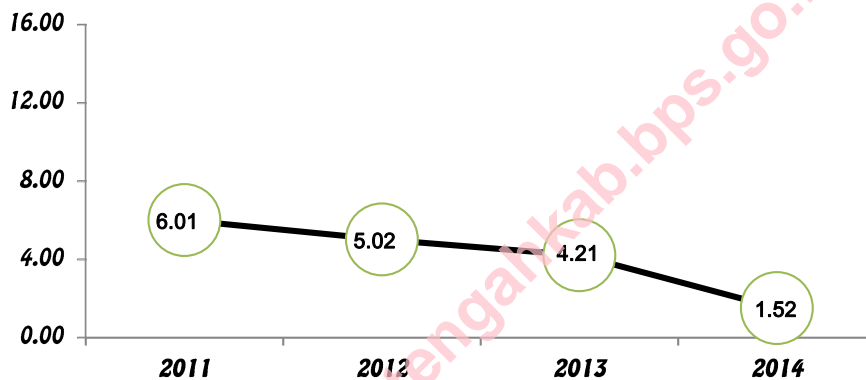
Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan PDRB Pengeluaran selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung melambat pertumbuhannya dimana pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,01 persen, pada tahun 2012 melambat sebesar 0,99 poin atau tumbuh sebesar 5,02 persen. Pada tahun 2013, kinerja perekonomian Bangka Tengah kembali turun sebesar 0,81 poin sehingga hanya tumbuh sebesar 4,21 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut terjadi pada tahun 2014

dimana kinerjanya turun cukup dalam yaitu sekitar 2,70 poin sehingga pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 1,52 persen.

Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana ekonomi Kabupaten Bangka Tengah tumbuh diatas 6 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 dimana hanya tumbuh sekitar 1,52 persen.

Gambar 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),2011-2014

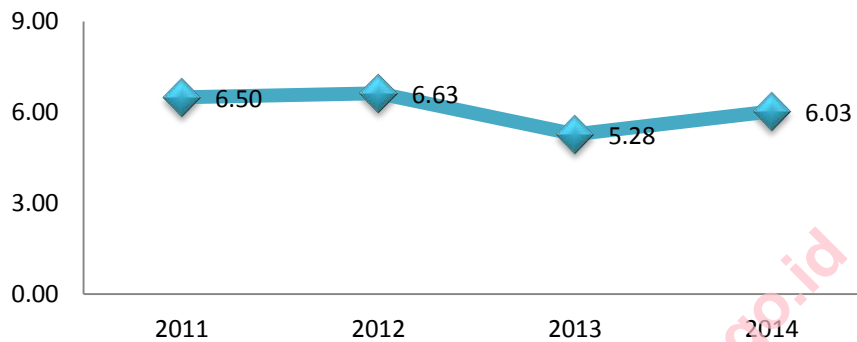


Jika dicermati pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan yang cukup dalam, ada beberapa hal yang mempengaruhinya yaitu terjadinya kontraksi pertumbuhan untuk komponen perubahan inventori dan net ekspor. Jika dikaitkan dengan fenomena dilapangan yang terjadi, pada tahun tersebut ada perusahaan pertambangan biji logam yang telah tutup. Hal ini berdampak terhadap tidak adanya produksi logam timah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga persediaan mengalami penurunan dan ekspor komoditi logam timah juga ikut menurun.

3.1.3. Perkembangan Indeks Implisit PDRB

Selain pertumbuhan ekonomi, agregat makro lainnya yang penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi/deflasi. Kenaikan perubahan harga yang terjadi di masyarakat disebut dengan inflasi, sedangkan perubahan harga yang menurun disebut dengan deflasi. Tingginya perubahan harga atau inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kesejahteraan rakyat.

Gambar 3.3. Laju Indeks Implisit PDRB
Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),2011-2014



Penghitungan PDRB menghasilkan tingkat perubahan harga yang dikenal dengan *deflator* PDRB. *Deflator* PDRB didasarkan pada penghitungan yang mengandung seluruh barang yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga *deflator* PDRB merupakan indeks harga yang berbasis luas yang seringkali digunakan untuk mengukur inflasi.

Perubahan harga untuk berbagai komponen PDRB menurut pengeluaran dapat diukur dengan laju indeks implisit. Indeks implisit pada PDRB menurut pengeluaran merupakan perbandingan antara komponen-komponen PDRB atas dasar harga berlaku dengan harga konstan 2010. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa laju indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) selama kurun waktu 5 tahun terakhir selalu positif dan berfluktuasi setiap tahunnya. Laju implisit yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan harga. Laju indeks implisit tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,63 persen dan terendah pada tahun 2013 sebesar 5,28 persen.

3.2. Perkembangan Konsumsi Rumah tangga

Perkembangan konsumsi rumah tangga selama kurun waktu 2010 – 2014 berdasarkan harga berlaku dan konstan menunjukkan peningkatan. Jika dilihat atas dasar harga berlaku pada tahun 2010, konsumsi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah sebesar 2 468,71 miliar rupiah dan pada tahun 2014 menjadi 3 902,17 miliar

rupiah. Begitu juga berdasarkan harga konstan, pada tahun 2010 konsumsi masyarakat Bangka Tengah sebesar 2 468,71 miliar rupiah dan di tahun 2014 mencapai 3 075,11 miliar rupiah. Salah satu faktor pendukung berkembangnya konsumsi rumah tangga setiap tahunnya adalah penambahan penduduk di Kabupaten Bangka Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 3.5. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar rupiah)	2.469	2.716	3.035	3.457	3.902
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	2.469	2.579	2.708	2.880	3.075
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	54,83	53,43	53,31	55,36	58,05
Rata-rata Konsumsi perRumah Tangga/Tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	60.883	66.205	71.584	79.775	88.076
b. ADHK 2010	60.883	62.873	63.882	66.466	69.409
Rata-rata Konsumsi per Kapita/Tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	15.221	16.551	17.896	19.944	22.019
b. ADHK 2010	15.221	15.718	15.970	16.616	17.352
Pertumbuhan (%)					
a. Konsumsi RT	-	4,47	5,00	6,36	6,76
b. Konsumsi perRT	-	3,27	1,60	4,04	4,43
c. Konsumsi perKapita	-	3,27	1,60	4,04	4,43
Jumlah RT (unit)	40.549	41.020	42.392	43.337	44.305
Jumlah Penduduk (000 orang)	162	164	170	173	177

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Peranan yang disumbangkan oleh komponen ini paling besar terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2010-2014. Peranan yang disumbangkan oleh komponen ini dalam pembentukan PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berfluktuatif. Peranan terbesar terjadi pada tahun 2014

yang mencapai 58 persen sedangkan peranan terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 53,31 persen.

Jika dilihat pada tabel 3.5, rata-rata konsumsi per rumah tangga atas harga berlaku dan konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Besaran nilai konsumsi akhir yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membiayai kebutuhan akan makanan dan non makanan pada tahun 2010 sekitar 60 juta rupiah. Pengeluaran ini setiap tahunnya mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 biaya konsumsi mencapai 88 juta rupiah.

Tabel 3.6. Struktur Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2010-2014

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	46,26	46,02	45,72	45,66	45,54
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,69	3,74	3,91	3,85	3,84
c. Perumahan, Parkir, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	14,73	14,90	15,12	15,38	15,50
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,14	5,17	5,19	5,18	5,21
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,99	18,36	18,73	18,99	19,14
f. Hotel dan Restoran	10,20	9,79	9,34	8,90	8,73
g. Lainnya	1,99	2,01	1,98	2,03	2,04
Konsumsi Rumah Tangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Sementara itu, perkembangan rata-rata konsumsi per rumah tangga selama kurun waktu 2010-2014 mengalami pertumbuhan dan berada pada kisaran antara 1-4 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,43

persen. Sementara itu, perkembangan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Bangka Tengah meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi perkapita selama tahun 2011-2014 secara riil berkisar antara 1-4 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara keseluruhan, Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga setiap tahunnya diatas 4 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,76 persen sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011.

Tabel 3.7. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2011-2014

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,95	4,30	6,24	6,48
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,86	9,68	4,76	6,37
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,68	6,54	8,19	7,61
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,94	5,53	6,14	7,36
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,62	7,15	7,81	7,62
f. Hotel dan Restoran	0,29	0,18	1,35	4,67
g. Lainnya	5,81	3,60	9,03	6,94

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Struktur pembentukan komponen konsumsi akhir rumah tangga selama tahun 2010-2014 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan rokok (lihat pada tabel 3.6). Proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan, minuman, dan rokok sekitar 45 - 46 persen dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, kontribusi yang diberikan oleh kelompok makanan, minuman dan rokok sebesar 46,26 persen, seiring waktu peranannya menjadi 45,52 persen pada tahun 2014. Begitu juga untuk kelompok hotel dan restoran selama kurun waktu 2010-2014 peranannya cenderung menurun. Sebaliknya, proporsi pengeluaran untuk kelompok pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga; dan transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya serta lainnya cenderung meningkat. Pergeseran pola proporsi konsumsi dari kelompok makanan ke non makanan ini menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Pengeluaran untuk kebutuhan nonmakanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan kelompok pengeluaran, selama kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan dari masing-masing kelompok mengalami peningkatan namun berfluktuatif. Pertumbuhan riil ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat.

Perkembangan kelompok konsumsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah kelompok konsumsi makanan, minuman dan rokok serta kelompok kesehatan dan pendidikan. Kelompok makanan, minuman dan rokok pada tahun 2011 tumbuh sebesar 3,95 persen dan pada tahun 2014 tumbuh menjadi 6,48 persen. kondisi ini didorong oleh perkembangan penduduk Kabupaten Bangka Tengah yang terus meningkat jumlahnya setiap tahun. Dampak dari penambahan penduduk juga mendorong kelompok konsumsi kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2011 kelompok ini tumbuh sekitar 4,94 persen dan pada tahun 2014 naik menjadi 7,36

persen. peningkatan kelompok kesehatan dan pendidikan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan pengetahuan masyarakatnya melalui program yang berbasis masyarakat seperti pengobatan gratis, pendidikan gratis dan sebagainya.

Sedangkan untuk kelompok konsumsi yang lainnya seperti pakaian dan alas kaki, perumahan, transportasi dan lainnya pertumbuhan yang tercipta dalam 5 tahun terakhir mengalami naik turun perkembangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa faktor musiman seperti liburan sekolah, perayaan hari besar keagamaan cukup kuat peranannya dalam membentuk pola konsumsi masyarakat Bangka Tengah.

Tabel 3.8. Laju Implisit Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Bangka Tengah (persen), 2011-2014

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman dan Rokok	4,14	6,01	7,02	5,63
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,04	2,41	7,14	3,51
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,32	6,96	7,69	5,51
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,35	6,31	8,36	6,02
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,04	6,33	6,71	6,39
f. Hotel dan Restoran	7,10	9,03	7,64	6,99
g. Lainnya	5,35	8,06	3,31	0,98

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 3.8 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Hal ini berarti setiap tahun rumah tangga membayar lebih mahal atas barang-barang yang dikonsumsinya, baik itu untuk kelompok makanan maupun non makanan. Jika hal ini

tidak diikuti oleh pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat, akan berakibat buruk bagi kesejahteraan penduduk Bangka Tengah.

Pengeluaran konsumsi ditentukan oleh dua hal yaitu pendapatan per kapita riil dan elastisitas pendapatan terhadap konsumsi. Secara makro, berubahnya pendapatan akan diikuti oleh berubahnya konsumsi. Tambahan pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan konsumsi menunjukkan kecenderungan dalam mengonsumsi atau perilaku berkonsumsi di suatu masyarakat. Kecenderungan mengonsumsi dapat diukur dengan menggunakan indikator MPC (*Marginal Propensity to Consume*).

Secara makro, MPC diperoleh dari perbandingan antara perubahan konsumsi dengan perubahan PDRB. Semakin tinggi kecenderungan masyarakat berkonsumsi, MPC-nya semakin besar sedangkan hasrat menabung atau MPS (*Marginal Propensity to Saving*) akan semakin kecil.

3.3. Perkembangan Konsumsi Lembaga Non Profit

Lembaga non profit merupakan lembaga yang memiliki nilai tambah paling rendah dibandingkan dengan komponen lainnya baik secara harga berlaku maupun harga konstan. Jika dilihat dari perkembangan selama kurun waktu 2010-2014, lembaga non profit menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik secara harga berlaku dan harga konstan. Berdasarkan harga berlaku, tahun 2010 lembaga ini memiliki nilai tambah sebesar 22,6 miliar rupiah dan ditahun 2014 meningkat menjadi 42,2 miliar rupiah. Begitu juga berdasarkan harga konstan, pada tahun 2014 mencapai 31 miliar rupiah dari 22,6 miliar rupiah ditahun 2010.

Peranan yang diciptakan oleh komponen lembaga non profit dalam pembentukan PDRB dibawah 1 (satu) persen dan paling rendah dibandingkan dengan komponen lainnya. Selama kurun waktu 2010-2014 sumbangan yang diberikan oleh lembaga ini relatif stabil dimana pada tahun 2010 besarnya sumbangan yng diberikan oleh komponen ini sekitar 0,50 persen dan ditahun 2014 sebesar 0,63 persen.

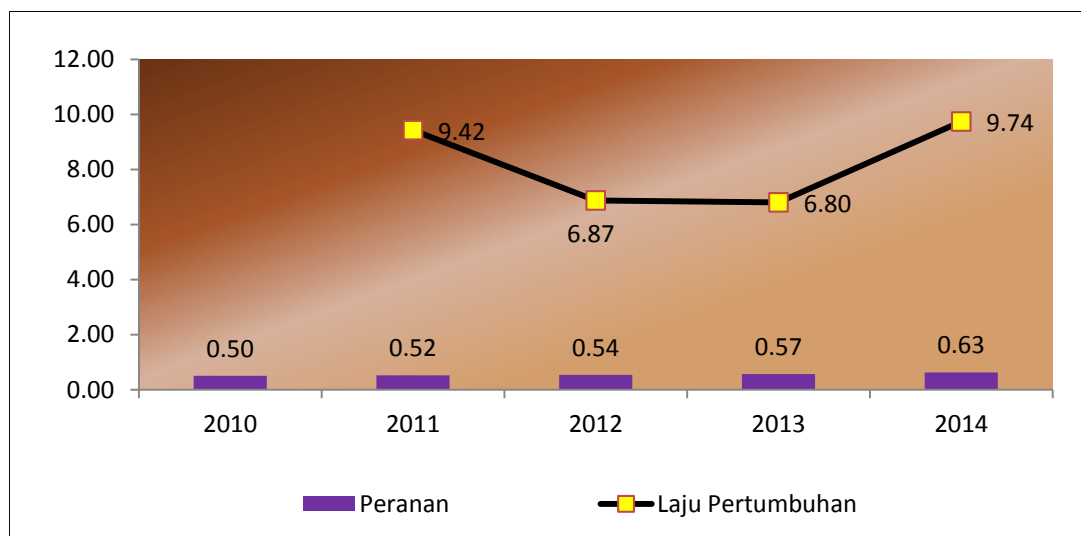
Tabel 3.9. Perkembangan Komponen Lembaga Non Profit Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPR					
b. ADHB (juta rupiah)	22 622	26 424	30 587	35 562	42 214
b. ADHK 2010 (juta rupiah)	22 622	24 753	26 455	28 254	31 005
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	0,50	0,52	0,54	0,57	0,63

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Laju pertumbuhan komponen lembaga non profit selama kurun waktu 2011-2014 berfluktuatif. Pada tahun 2011, lembaga ini mengalami pertumbuhan sebesar 9,42 persen. Pada tahun 2012 komponen ini tumbuh sebesar 6,87 persen, lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh adanya adanya kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat calon gubernur dan pemilihan gubernur periode 2012-2017 sehingga aktivitas lembaga ini masih tumbuh positif. Selain itu aktivitas dilembaga sosial dan keagamaan juga mendorong lembaga ini tetap tumbuh.

Gambar 3.4. Peranan dan Pertumbuhan Lembaga Non Profit Kabupaten Bangka Tengah(persen),2010-2014



Dengan adanya kegiatan STQ Nasional di Kabupaten Bangka Tengah, kegiatan tersebut mampu mendorong lembaga non profit tumbuh positif pada tahun 2013 dan pertumbuhannya relatif sama dengan tahun sebelumnya sekitar 6,80 persen. sementara itu, pada tahun 2014 adanya kegiatan pemilihan presiden, kegiatan tersebut mendorong lembaga non profit mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sekitar 9,74 persen. pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014 merupakan pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi disuatu wilayah adalah permintaan pemerintah atas barang dan jasa yang dihasilkan seluruh faktor produksi di suatu wilayah. Peranan dari konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Bangka Tengah serta perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Konsumsi pemerintah pada dasarnya dihitung oleh dua sumber dana yaitu dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pengeluaran konsumsi pemerintah berupa pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin dan habis pakai, upah gaji pegawai, perkiraan penyusutan barang modal dikurangi dengan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit kegiatan pemerintah.

Jika dilihat perkembangan konsumsi pemerintah dalam 5 tahun terakhir berdasarkan harga berlaku dan harga konstan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan harga berlaku, nilai tambah yang dimiliki oleh komponen ini pada tahun 2010 sebesar 425 miliar rupiah, meningkat sebesar 85 miliar rupiah pada tahun 2011, begitu juga pada tahun 2012, peningkatan relatif sama dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar 85 miliar rupiah. Pada tahun 2013, peningkatan yang terjadi cukup tinggi yaitu sekitar 102 miliar rupiah, begitu juga untuk tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 104 miliar rupiah.

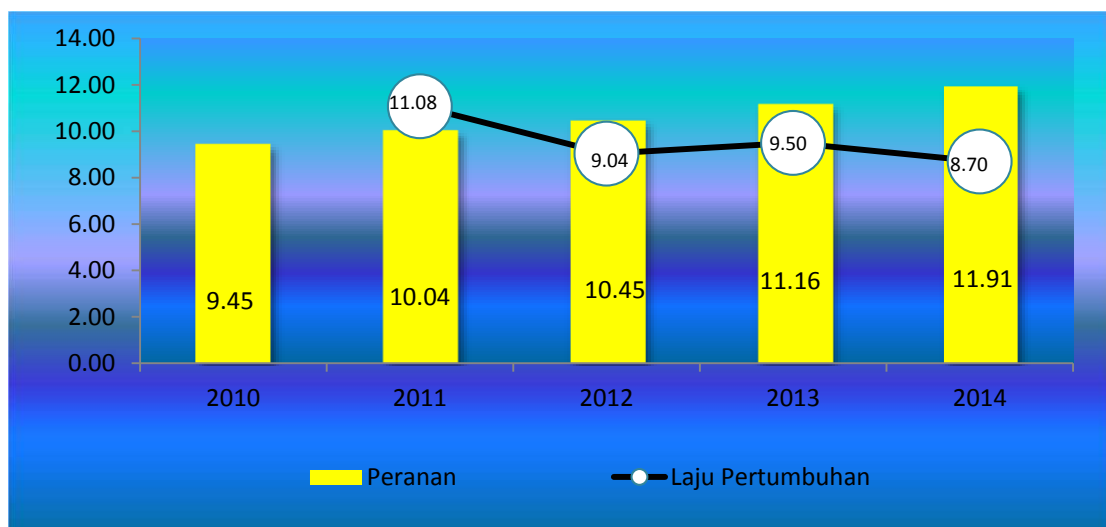
Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar rupiah)	425	510	595	697	801
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	425	472	515	564	613
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	9,45	10,04	10,45	11,16	11,91

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Peranan yang disumbangkan oleh komponen konsumsi pemerintah selama kurun waktu 2010 – 2014 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 peranan konsumsi pemerintah sekitar 9,45 persen, tahun 2011 meningkat sebesar 0,59 poin menjadi 10,04 persen. Pada tahun 2012 peranannya sebesar 10,45 persen atau naik sekitar 0,41 poin. Begitu juga untuk tahun 2013 dan 2014, peranan yang diberikan dalam pembentukan PDRB masing-masing sebesar 11,16 persen dan 11,91 persen atau naik sekitar 0,7 poin setiap tahunnya.

Gambar 3.5. Peranan dan Pertumbuhan Komponen Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah(persen),2010-2014



Gambaran tentang peningkatan konsumsi akhir pemerintah secara riil merupakan pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Berdasarkan harga konstan, nilai tambah yang dimiliki oleh komponen ini pada tahun 2010 sebesar 425 miliar rupiah, meningkat sebesar 47 miliar rupiah pada tahun 2011. Pada tahun 2012 peningkatan yang terjadi relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sekitar 43 miliar rupiah. Pada tahun 2013 dan 2014, peningkatan yang terjadi sekitar 49 miliar rupiah.

Besarnya nilai konsumsi akhir pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2010-2014 dikarenakan letak kantor dari pemerintah provinsi sebagian berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, begitu juga untuk pemerintah pusat yang diperbantukan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penghitungan Konsumsi pemerintah kabupaten Bangka Tengah meliputi konsumsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka Tengah.

Perkembangan konsumsi pemerintah selama kurun waktu 2010-2014 berfluktuatif dan kecenderungannya menurun perkembangannya. Pada tahun 2011, konsumsi akhir pemerintah tumbuh mencapai 11,08 persen, tahun 2012 perkembangannya melambat dimana pertumbuhan yang terjadi hanya 9,04 persen. sementara itu, untuk tahun 2013 konsumsi pemerintah mengalami peningkatan sebesar 9,50 persen dan tahun berikutnya kembali melambat pertumbuhannya.

Selama periode 2011-2014, pertumbuhan tertinggi dari konsumsi akhir pemerintah terjadi pada tahun 2011. Tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun tersebut disebabkan adanya pembayaran tunjangan kinerja oleh beberapa instansi vertikal dilingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten Bangka Tengah serta adanya kenaikan gaji sebesar 10 persen dan kenaikan uang makan serta adanya penerimaan pegawai dalam skala besar.

3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembangunan suatu wilayah secara makro tidak lepas dari peran serta investasi. Dengan investasi kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti peningkatan output/pendapatan. Dalam waktu yang panjang, investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktifitas ekonomi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Investasi yang dimaksud di sini adalah investasi fisik, yaitu sama dengan besarnya PMTB, karena PMTB menggambarkan pembentukan modal (investasi) secara fisik yang terjadi di suatu wilayah yang telah direalisasikan pada suatu tahun tertentu dalam bentuk berbagai jenis barang modal.

Tabel 3.11 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMTB					
a. ADHB (miliar rupiah)	898	1 025	1 158	1 332	1 557
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	567	635	708	803	920
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	19,95	20,16	20,33	21,33	23,16
Struktur PMTB (%)					
a. Bangunan	63,06	61,98	61,14	60,27	59,10
b. Non Bangunan	36,94	38,02	38,86	39,73	40,90
PMTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	-	6,58	5,61	4,48	4,42
b. Non Bangunan	-	7,23	6,18	13,	14,9
PMTB	-	6,82	5,82	7,65	8,51

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

PMTB dapat digolongkan dalam bentuk bangunan/konstruksi, dan non bangunan. Barang modal tersebut merupakan peralatan yang digunakan untuk

berproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian/kegunaan lebih dari satu tahun.

Selama kurun waktu 2010-2014, nilai barang modal Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan peningkatan baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Berdasarkan harga berlaku, PMTB yang tercipta sebesar 898 miliar rupiah tahun 2010 dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 PMTB yang tercipta sebesar 1 557 miliar rupiah. Begitu juga berdasarkan harga konstan, pada tahun 2010 sebesar 898 miliar rupiah dan pada tahun 2014 mencapai 1 186 miliar rupiah.

Peranan investasi terhadap pembentukan PDRB selama kurun waktu 2010-2014 secara rata-rata sebesar 20,99 persen. Peranan terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 23,16 persen. sedangkan peranan terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,95 persen.

Gambar 3.6. Peranan dan Pertumbuhan PMTB
Kabupaten Bangka Tengah(persen),2010-2014



Perkembangan pertumbuhan sektor PMTB selama kurun waktu 2011-2014 berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,51 persen, hal ini didorong oleh adanya pembangunan fasilitas pariwisata, adanya pembangunan bandara Depati Amir oleh angkasa pura, adanya perbaikan jalan dan jembatan serta

adanya pembangunan pusat perbelanjaan. Selain itu adanya pembangunan properti (perumahan dan ruko) yang dilakukan oleh pihak swasta dan rumahtangga serta adanya perluasan lahan pertanian. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,82 persen.

3.6. Perkembangan Perubahan Inventori

Inventori dalam ekonomi makro dapat diartikan persediaan barang pertanian, pertambangan, industri pengolahan dan sejenisnya sedangkan dalam ekonomi mikro, inventori dapat diartikan persediaan bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi/barang jadi, suku cadang, barang dalam perjalanan dan sejenisnya.

Inventori merupakan persediaan barang (jadi maupun setengah jadi) pada unit institusi yang tidak terpakai pada proses atau belum selesai diproses atau belum terjual sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode pencatatan dengan nilai inventori pada awal pencatatan. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bisa bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif)

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Perkembangan perubahan inventori selama kurun waktu 2010-2014 cenderung menurun berdasarkan harga berlaku dan konstan. Nilai perubahan inventori berdasarkan harga berlaku selama kurun waktu tersebut tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 179 miliar rupiah. Sedangkan nilai inventori terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 82 miliar rupiah. Begitu juga berdasarkan harga konstan, nilai perubahan inventori tertinggi terjadi di tahun 2010 dan terendah pada tahun 2014 (lihat tabel 3.10)

Tabel 3.12. Perkembangan Perubahan Inventori
Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perubahan Inventori b. ADHB (miliar rupiah)	179	171	158	172	82
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	179	146	125	124	60
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	3,98	3,35	2,77	2,75	1,22

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Peranan yang disumbangkan oleh komponen perubahan inventori terhadap pembentukan PDRB Menurut Pengeluaran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2010, peranan komponen ini sekitar 3,98 persen, tahun 2014 turun menjadi 1,22 persen.

Kontribusi tertinggi dari sektor perubahan Inventori selama kurun waktu 2010-2014 terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 3,98 persen. Hal ini didorong oleh tingginya produksi yang terjadi pada tahun tersebut. Sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,22 persen. melemahnya peranan perubahan persediaan yang terjadi pada tahun tersebut disebabkan menurunnya persediaan industri logam timah akibat dari tutupnya perusahaan pertambangan di Kabupaten Bangka Tengah.

Proporsi perubahan inventori yang berada pada kisaran 2-4 persen menunjukkan distribusi atau pemasaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berjalan dengan baik, di mana salah satu penyumbang terbesar dalam perubahan inventori tersebut adalah komoditas timah.

3.7. Perkembangan Ekspor dan Impor

Peran perdagangan dalam negeri dan luar negeri cukup penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara penuh akan berusaha mendatangkan dari daerah/negara lain. Pada sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik juga terdorong memperluas pasar ke luar daerah bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, maka produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi juga semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lancar. Kondisi tersebut mendorong aktifitas ekspor-impor barang dan jasa di kabupaten/kota semakin berkembang.

Ekspor-impor barang dan jasa kabupaten/kota didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen kabupaten/kota dengan pelaku ekonomi non-residen yang berasal dari luar kabupaten/kota baik Indonesia maupun luar negeri (*United Nations*, 2009: 56).

Perkembangan ekspor barang dan jasa Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir berdasarkan harga berlaku mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010, nilai ekspor sebesar 3 477 miliar rupiah dan pada tahun 2014 sebesar 4 009 miliar rupiah. Terjadinya fluktuatif dari nilai ekspor atas dasar harga berlaku disebabkan oleh faktor harga dan kurs ekspor, jika harga komoditi ekspor naik dan kurs ekspor tinggi maka nilai ekspor juga akan meningkat begitu juga sebaliknya. Disisi lain, peranan yang disumbangkan oleh sektor ekspor barang dan jasa dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2010-2014 mengalami

penurunan. Peranan yang tercipta pada tahun 2010 sebesar 77,23 persen dan di tahun 2014 hanya sekitar 59 persen atau turun sekitar 17,5 poin.

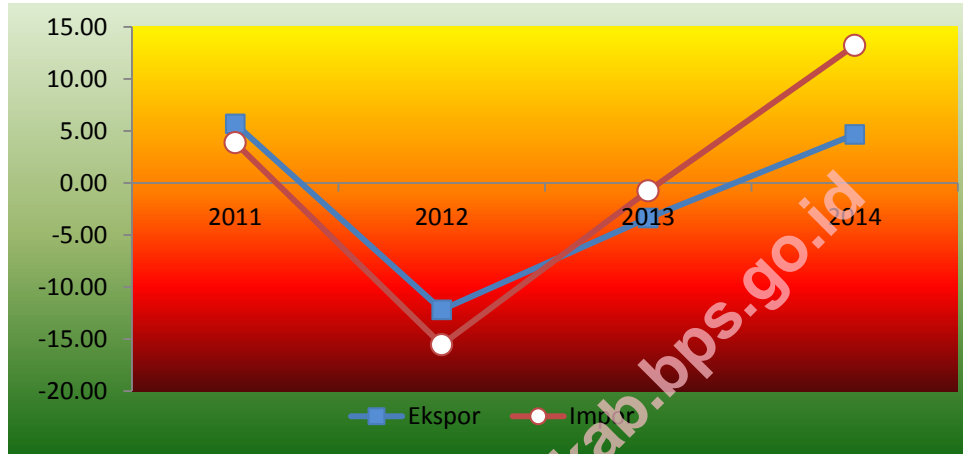
Tabel 3.13. Perkembangan Ekspor dan Impor
Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EKSPOR BARANG & JASA					
- ADHB (miliar rupiah)	3 477	3 831	3 637	3 620	4 009
- ADHK 2010 (miliar rupiah)	3 477	3 675	3 227	3 118	3 263
Proporsi Terhadap PDRB (% ADHB)	77,23	75,36	63,89	57,97	59,64
Laju Petumbuhan (%)	4,69	5,69	-12,20	-3,37	4,66
IMPOR BARANG & JASA					
- ADHB (miliar rupiah)	2 969	3 195	2 920	3 069	3 670
- ADHK 2010 (miliar rupiah)	2 969	3 084	2 604	2 584	2 926
Proporsi Terhadap PDRE (% ADHB)	65,95	62,86	51,29	49,14	54,60
Laju Petumbuhan (%)	6,40	3,86	-15,56	-0,76	13,22

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Tingginya peranan yang disumbangkan oleh sektor Ekspor ternyata tidak sejalan dengan perkembangannya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan sektor ini kecenderungannya menurun yaitu dari 5,69 persen di tahun 2011 menjadi 4,66 persen tahun 2014. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2012. Penurunan perkembangan ekspor barang dan jasa ini disebabkan komoditi unggulan ekspor Kabupaten Tengah yaitu logam timah selama 3 tahun terakhir produksinya turun cukup dalam. Jika dilihat dari peranan ekspor terhadap pembentukan PDRB cukup besar dapat diartikan bahwa ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dipengaruhi oleh komponen ini.

Gambar 3.7. Pertumbuhan riil Ekspor dan Impor Kabupaten Bangka Tengah(persen),2011-2014



Sementara itu, Impor barang dan jasa selama kurun waktu 5 tahun terakhir jika dilihat berdasarkan harga berlaku dan harga konstan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan harga berlaku, nilai impor pada tahun 2010 sebesar 2 969 miliar rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3 670 miliar rupiah. Jika dicermati selama kurun waktu tersebut nilainya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini hampir sama dengan ekspor dimana faktor perubahan harga dan kurs impor memiliki peranan cukup kuat.

Kontribusi yang diberikan oleh sektor ini selama kurun waktu 5 tahun terakhir berkisar antara 49 – 65 persen dimana peranan terbesar terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 65 persen sedangkan peranan terendah terjadi pada tahun 2013 yang hanya 49,14 persen. Dilhat dari besarnya peranan yang diberikan maka Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah yang memiliki ketergantungan dari daerah luar kabupaten dalam memenuhi kebutuhan untuk konsumsi antara dan konsumsi akhir.

Perkembangan dari sektor ini selama periode 2011-2014 berfluktuatif. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan impor barang dan jasa sebesar 3,86 persen, tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan cukup tajam dan ditahun 2014 kembali tumbuh positif.



Bab 4
Perkembangan
Agregat PDRB



<http://bangkajati.pahkab.bps.go.id>

Bab. IV

Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran

Dalam analisis sosial ekonomi, penggunaan data PDRB sebagai indikator ekonomi makro sering dilakukan di tengah keterbatasan informasi yang tersedia. Dari data PDRB dapat diturunkan beberapa data indikator yang dapat menghasilkan beberapa rasio (perbandingan relatif) untuk melengkapi analisis yang ada, seperti disajikan pada uraian berikut ini.

4.1. PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

PDRB yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran akan menghasilkan data PDRB menurut pengeluaran. Dari series data PDRB menurut pengeluaran tersebut dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB perkapita.

Perkembangan nilai PDRB per Kapita selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya baik atas harga berlaku maupun harga konstan 2010. Pada tahun 2010, nilai PDRB per Kapita atas harga berlaku sebesar 27,75 juta rupiah dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 37,92 juta rupiah. Begitu juga berdasarkan harga konstan selama kurun waktu tersebut juga mengalami peningkatan

dimana pada tahun 2010 nilainya sebesar 27,75 juta rupiah dan pada tahun 2014 menjadi 29,92 juta rupiah.

Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (miliar rupiah)					
a. ADHB	4 502	5 083	5 692	6 245	6 722
b. ADHK 2010	4 502	4 773	5 013	5 224	5 303
PDRB per Kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	27 759	30 980	33 570	36 027	37 932
b. ADHK2010	27 759	29 090	29 563	30 136	29 924
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK2010 (%)	-	4,79	1,62	1,94	-0,70
Jumlah Penduduk (000 orang)	162	164	170	173	177
Pertumbuhan Penduduk (%)	-	1,16	3,34	2,23	2,23

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa perkembangan nilai PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan peningkatannya sangat kecil dan ditahun 2014 nilainya lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan PDRB per Kapita selama kurun waktu 5 tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2011, hal ini diebabkan pertumbuhan penduduk pada tahun tersebut sangat rendah yaitu sekitar 1 persen sehingga nilai PDRB per kapitanya tinggi. Sebaliknya, pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu minus 0,70 persen. Hal ini didorong oleh kenaikan PDRB harga konstan hanya 1,52 persen sedangkan kenaikan penduduknya diatas 2 persen sehingga nilai perkapitanya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa ekonomi Kabupaten Bangka Tengah sedang lesu dan berdampak terhadap per kapita juga menurun.

4.2. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga Terhadap Ekspor Barang dan Jasa

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Bangka Tengah (rata-rata di atas 50 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor luar negeri atau provinsi lain.

Tabel 4.2. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah tangga Terhadap Ekspor Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	2 469	2 716	3 035	3 457	3 902
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	3 477	3 831	3 637	3 620	4 009
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap Ekspor	0,71	0,71	0,83	0,95	0,97

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 4.2, Perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan ekspor barang dan jasa selama kurun waktu 2010-2014 terlihat bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga berkisar antara 0,7 – 0,9 kali dari yang ekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik digunakan untuk ekspor, sisanya diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Tentunya hal ini tidaklah mengherankan mengingat besarnya kontribusi ekspor Kabupaten Bangka Tengah terhadap total PDRB terutama untuk ekspor komoditas timah yang menjadi andalan. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,97 dan terendah pada tahun 2010 sebesar 0,71. Peningkatan rasio tersebut disebabkan peningkatan nilai ekspor tidak sebesar peningkatan konsumsi rumah tangga. Pada

tahun 2010-2014 rasio terus mengalami peningkatan yang disebabkan peningkatan konsumsi rumah tangga yang lebih besar daripada peningkatan nilai ekspor. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumahtangga Terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi oleh rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (PMTB).

Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumahtangga Terhadap PMTB Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	2 469	2 716	3 035	3 457	3 902
PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	898	1 025	1 158	1 332	1 557
Perbandingan Konsumsi RT Terhadap PMTB	2,75	2,65	2,62	2,59	2,51

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Jika dilihat pada tabel 4.3 diatas, rasio perbandingan antara konsumsi akhir rumahtangga terhadap investasi dalam kurun waktu 5 tahun terkahir diatas 2. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang tersedia (*supply*) lebih besar digunakan untuk memenuhi permintaan dari konsumsi rumahtangga sekitar 2-3 kali daripada permintaan untuk investasi fisik (PMTB). Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah berkembang dengan tingkat konsumsi rumahtangga diatas investasi. Selama kurun waktu 2010-2014, perkembangan rasionya menunjukkan penurunan setiap tahunnya. kondisi ini menandakan bahwa permintaan untuk invesatasi fiik (PMTB) mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.4. Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB
Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)	2 917	3 252	3 660	4 190	4 745
Rumahtangga	2 469	2 716	3 035	3 457	3 902
LNPRT	23	26	31	36	42
Pemerintah	425	510	595	697	801
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	4 502	5 083	5 692	6 245	6 722
Proporsi	0,65	0,64	0,64	0,67	0,71

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (sekitar 65 persen lebih). Peningkatan konsumsi akhir setiap tahunnya dalam kurun waktu 2010-2014, diikuti peningkatan proporsinya terhadap PDRB. Tahun 2010, proporsi konsumsi akhir sekitar 65 persen dan ditahun 2014 meningkat menjadi 71 persen. hal ini menunjukkan tingginya permintaan akan produk yang dihasilkan untuk memenuhi konsumsi domestik.

4.5. Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di Kabupaten Bangka Tengah, tetapi diperdagangkan ke luar negeri atau luar daerah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 4.5. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PMTB
Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	3 477	3 831	3 637	3 620	4 009
PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	898	1 025	1 158	1 332	1 557
Rasio Ekspor Terhadap PMTB	3,87	3,74	3,14	2,72	2,58

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Selama tahun 2010-2014, produk domestik yang diekspor berkisar antara 2-3 kali dari PMTB. Pada tahun 2010 rasio ekspor terhadap PMTB sebesar 3,87, kemudian pada tahun 2014 mengalami perlambatan yaitu 2,58. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio disebabkan oleh kenaikan PMTB lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan Ekspor, demikian pula sebaliknya.

4.6. Neraca Perdagangan

Ekspor-impor barang dan jasa didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen kabupaten/kota dengan pelaku ekonomi non-residen yang berasal dari luar kabupaten/kota baik Indonesia maupun luar negeri (*United Nations*, 2009: 56).

Net ekspor merupakan selisih antara ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa. Jika nilai net ekspor positif dapat diartikan neraca perdagangan mengalami surplus sebaliknya jika nilai net ekspor negatif maka neraca perdagangan mengalami defisit.

Neraca perdagangan Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2010-2014 berdasarkan harga berlaku dan konstan mengalami surplus setiap tahunnya namun kecenderungan menurun perkembangannya. Pada tahun 2010, berdasarkan harga berlaku neraca perdagangan memiliki surplus sebesar 508 miliar rupiah dan pada tahun 2014 hanya 339 miliar rupiah. Berdasarkan harga konstan, neraca perdagangan memiliki surplus sebesar 508 miliar rupiah tahun 2010 dan pada tahun 2014 sekitar 337 miliar rupiah.

Peranan yang diberikan oleh komponen net ekspor dalam pembentukan PDRB selama kurun waktu 2010-2014 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2010, peranannya sebesar 11,28 persen dan pada tahun 2014 relatif lebih rendah yaitu sekitar 5 persen.

Pertumbuhan net ekspor selama kurun waktu 2010-2014 mengalami penurunan yang cukup tajam. Net ekspor mengalami pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2011-2012 dimana besaran pertumbuhan masing-masing yaitu 16,37 persen dan 5,32 persen. Net ekspor tumbuh positif pada 2 tahun tersebut disebabkan pada tahun tersebut permintaan dari luar daerah atau luar negeri akan komoditi ekspor dari Kabupaten Bangka Tengah cukup tinggi sehingga mendorong ekspor mengalami

peningkatan. Faktor lainnya yang menyebabkan net ekspor tumbuh adalah meningkatnya produksi yang dilakukan pada tahun tersebut.

Tabel 4.6. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Kabupaten Bangka Tengah, 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	3 477	3 831	3 637	3 620	4 009
Impor (ADHB) (miliar rupiah)	2 969	3 195	2 920	3 069	3 670
Net Ekspor (miliar rupiah)	508,02	635,77	717,11	551,19	338,72
Peranan Net Ekspor (%)	11,28	12,51	12,60	8,83	5,04
Ekspor (ADHK) (miliar rupiah)	3 477	3 675	3 227	3 118	3 263
Impor (ADHK) (miliar rupiah)	2 969	3 084	2 604	2 584	2 926
Net Ekspor (miliar rupiah)	508,02	591,20	622,63	533,73	337,51
Pertumbuhan Net Ekspor (%)	-	16,37	5,32	-14,28	-36,77

Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Sementara itu, pertumbuhan negatif dari komponen net ekspor terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu sebesar minus 14,28 persen dan minus 36,77 persen. hal ini disebabkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan mengalami penurunan. Turunnya kuantitas produksi mengakibatkan pasokan untuk kegiatan ekspor barang dan jasa juga mengalami penurunan. Jika dikaitkan dengan keadaan lapangan, terjadinya penurunan nilai ekspor dampak dari tutupnya salah satu perusahaan pertambangan dan industri smelter di Kabupaten Bangka Tengah.

4.7 *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

"**ICOR**" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sementara output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "nilai tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit, dengan formula sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t


Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 4.7. *Incremental Capital Output Ratio*
Kabupaten Bangka Tengah, 2011-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (miliar rupiah)	4 502	4 773	5 013	5 224	5 303
Perubahan PDRB (miliar rupiah)	-	271	240	211	79
PMTB ADHK (miliar rupiah)	-	960	1 016	1 093	1 186
ICOR	-	3,54	4,24	5,18	14,98


Keterangan: *Angka sementara **Angka sangat sementara

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa selama tahun 2011-2014 besaran ICOR cenderung mengalami peningkatan dari 3,54 pada tahun 2011 hingga menjadi 14,98 pada tahun 2014. Nilai ICOR sebesar 14,98 pada tahun 2014 menunjukkan bahwa untuk menaikkan output sebesar 1 miliar rupiah, membutuhkan investasi sebesar 14,98 miliar rupiah. Namun pada kenyataannya, pertambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor lain selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).



Bab 5

Penutup



<http://bangsatengahkab.bps.go.id>

Bab. V Penutup

- a. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010-2014 menggambarkan struktur ekonomi dan perkembangan perekonomian berdasarkan penggunaan barang dan jasa di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Berbeda dengan analisis ekonomi dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi, analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian yaitu rumahtangga, lembaga non profit yang melayani rumahtangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
- b. Analisis yang disajikan merupakan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, dan perdagangan antar daerah. Analisis tersebut didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Dengan menambahkan beberapa indikator sosial demografi, seperti penduduk dan rumahtangga, hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
- c. Penyajian data dalam publikasi ini dalam bentuk series, yaitu dari tahun 2010-2014. Hal ini untuk memudahkan dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Satuan dari masing-masing parameter juga berbeda-beda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
- d. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variable ekonomi

dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain, seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana.

<http://bangkatengahkab.bps.go.id>

Lampiran

<http://bangkotengahkab.bps.go.id>

Tabel 1. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),2010-2014

PENGGUNAAN	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
1. Konsumsi Rumah tangga	2 468 718	2 715 735	3 034 600	3 457 161	3 902 170
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1 141 910	1 236 157	1 366 740	1 553 890	1 747 719
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	91 188	103 320	116 053	130 268	143 431
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Pe	363 727	408 704	465 740	542 676	616 102
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	126 993	140 398	157 510	181 158	206 201
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Bud	444 078	502 065	572 004	658 022	753 429
1.f. Hotel dan Restoran	251 812	270 463	295 397	322 264	360 903
1.g. Lainnya	49 010	54 628	61 157	68 883	74 385
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	22 622	26 424	30 587	35 562	42 214
3. Konsumsi Pemerintah	425 315	510 134	594 821	696 964	800 532
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	898 415	1 024 643	1 157 556	1 332 298	1 556 897
4.1. konstruksi	566 565	635 111	707 677	802 987	920 051
4.2. Non konstruksi	331 850	389 537	449 879	529 311	636 846
5. Perubahan Stok	179 308	170 505	157 786	171 919	81 786
6. Ekspor	3 477 318	3 830 845	3 636 655	3 620 321	4 009 158
7. Impor	2 969 300	3 195 079	2 919 549	3 069 134	3 670 438
Produk Domestik Regional Bruto	4 502 396	5 083 212	5 692 455	6 245 090	6 722 319

ket : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 2. PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah),2010-2014

PENGGUNAAN	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
1. Konsumsi Rumah tangga	2 468 718	2 579 060	2 708 079	2 880 390	3 075 115
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1 141 910	1 186 996	1 238 000	1 315 205	1 400 424
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	91 188	96 528	105 876	110 919	117 985
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Pe	363 727	384 396	409 533	443 094	476 794
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	126 993	133 267	140 634	149 263	160 254
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Bud	444 078	473 478	507 324	546 929	588 627
1.f. Hotel dan Restoran	251 812	252 540	252 989	256 407	268 388
1.g. Lainnya	49 010	51 856	53 723	58 573	62 641
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	22 622	24 753	26 455	28 254	31 005
3. Konsumsi Pemerintah	425 315	472 447	515 153	564 076	613 150
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	898 415	959 702	1 015 572	1 093 255	1 186 336
4.1. konstruksi	566 565	603 860	637 752	666 321	695 786
4.2. Non konstruksi	331 850	355 842	377 820	426 934	490 550
5. Perubahan Stok	179 308	145 980	124 977	124 228	59 995
6. Ekspor	3 477 318	3 675 066	3 226 795	3 118 042	3 263 403
7. Impor	2 969 300	3 083 869	2 604 167	2 584 309	2 925 898
Produk Domestik Regional Bruto	4 502 396	4 773 137	5 012 863	5 223 936	5 303 106

ket : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen),2010-2014

PENGGUNAAN	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
1. Konsumsi Rumah tangga	54,83	53,43	53,31	55,36	58,05
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	25,36	24,32	24,01	24,88	26,00
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,03	2,03	2,04	2,09	2,13
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Pe	8,08	8,04	8,18	8,69	9,17
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,82	2,76	2,77	2,90	3,07
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Bud	9,86	9,88	10,05	10,54	11,21
1.f. Hotel dan Restoran	5,59	5,32	5,19	5,16	5,37
1.g. Lainnya	1,09	1,07	1,07	1,10	1,11
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,50	0,52	0,54	0,57	0,63
3. Konsumsi Pemerintah	9,45	10,04	10,45	11,16	11,91
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	19,95	20,16	20,33	21,33	23,16
4.1. konstruksi	12,58	12,49	12,43	12,86	13,69
4.2. Non konstruksi	7,37	7,66	7,90	8,48	9,47
5. Perubahan Stok	3,98	3,35	2,77	2,75	1,22
6. Ekspor	77,23	75,36	63,89	57,97	59,64
7. Impor	65,95	62,86	51,29	49,14	54,60
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen),2010-2014

PENGGUNAAN	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
1. Konsumsi Rumah tangga	54,83	54,03	54,02	55,14	57,99
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	25,36	24,87	24,70	25,18	26,41
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,03	2,02	2,11	2,12	2,22
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Pe	8,08	8,05	8,17	8,48	8,99
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,82	2,79	2,81	2,86	3,02
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Bud	9,86	9,92	10,12	10,47	11,10
1.f. Hotel dan Restoran	5,59	5,29	5,05	4,91	5,06
1.g. Lainnya	1,09	1,09	1,07	1,12	1,18
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,50	0,52	0,53	0,54	0,58
3. Konsumsi Pemerintah	9,45	9,90	10,28	10,80	11,56
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	19,95	20,11	20,26	20,93	22,37
4.1. konstruksi	12,58	12,65	12,72	12,76	13,12
4.2. Non konstruksi	7,37	7,46	7,54	8,17	9,25
5. Perubahan Stok	3,98	3,06	2,49	2,38	1,13
6. Ekspor	77,23	76,99	64,37	59,69	61,54
7. Impor	65,95	64,61	51,95	49,47	55,17
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen),2010-2014

PENGGUNAAN	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
1. Konsumsi Rumah tangga	-	10,01	11,74	13,92	12,87
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	8,25	10,56	13,69	12,47
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-	13,31	12,32	12,25	10,10
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Pe	-	12,37	13,96	16,52	13,53
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	10,56	12,19	15,01	13,82
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Bud	-	13,06	13,93	15,04	14,50
1.f. Hotel dan Restoran	-	7,41	9,22	9,10	11,99
1.g. Lainnya	-	11,46	11,95	12,63	7,99
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	-	16,81	15,75	16,27	18,71
3. Konsumsi Pemerintah	-	19,94	16,60	17,17	14,86
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-	14,05	12,97	15,10	16,86
4.1. konstruksi	-	12,10	11,43	13,47	14,58
4.2. Non konstruksi	-	17,38	15,49	17,66	20,32
5. Perubahan Stok	-	(4,91)	(7,46)	8,96	(52,43)
6. Ekspor	-	10,17	(5,07)	(0,45)	10,74
7. Impor	-	7,60	(8,62)	5,12	19,59
Produk Domestik Regional Bruto		12,90	11,99	9,71	7,64

ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Pengeluaran (persen),2010-2014

PENGGUNAAN	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
1. Konsumsi Rumah tangga	-	4,47	5,00	6,36	6,76
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	3,95	4,30	6,24	6,48
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-	5,86	9,68	4,76	6,37
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Pe	-	5,68	6,54	8,19	7,61
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	4,94	5,53	6,14	7,36
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Bud	-	6,62	7,15	7,81	7,62
1.f. Hotel dan Restoran	-	0,29	0,18	1,35	4,67
1.g. Lainnya	-	5,81	3,60	9,03	6,94
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	-	9,42	6,87	6,80	9,74
3. Konsumsi Pemerintah	-	11,08	9,04	9,50	8,70
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-	6,82	5,82	7,65	8,51
4.1. konstruksi	-	6,58	5,61	4,48	4,42
4.2. Non konstruksi	-	7,23	6,18	13,00	14,90
5. Perubahan Stok	-	(18,59)	(14,39)	(0,60)	(51,71)
6. Ekspor	-	5,69	(12,20)	(3,37)	4,66
7. Impor	-	3,86	(15,56)	(0,76)	13,22
Produk Domestik Regional Bruto	-	6,01	5,02	4,21	1,52

ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),2010-2014

PENGGUNAAN	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
1. Konsumsi Rumah tangga	100,00	105,30	112,06	120,02	126,90
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	104,14	110,40	118,15	124,80
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	107,04	109,61	117,44	121,57
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Pe	100,00	106,32	113,72	122,47	129,22
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	105,35	112,00	121,37	128,67
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Bud	100,00	106,04	112,75	120,31	128,00
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	107,10	116,76	125,68	134,47
1.g. Lainnya	100,00	105,35	113,84	117,60	118,75
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	100,00	106,75	115,02	125,86	136,15
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	107,98	115,46	123,56	130,56
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	100,00	106,77	113,98	121,87	131,24
4.1. konstruksi	100,00	105,18	110,96	120,51	132,23
4.2. Non konstruksi	100,00	109,47	119,07	123,98	129,82
5. Perubahan Stok	100,00	116,80	126,25	138,39	136,32
6. Ekspor	100,00	104,24	112,70	116,11	122,85
7. Impor	100,00	103,61	112,11	118,76	125,45
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	106,50	113,56	119,55	126,76

ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Laju Indeks Implisit PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Pengeluaran (persen),2010-2014

PENGGUNAAN	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
1. Konsumsi Rumah tangga	-	5,30	6,42	7,11	5,72
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	-	4,14	6,01	7,02	5,63
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-	7,04	2,41	7,14	3,51
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Pe	-	6,32	6,96	7,69	5,51
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-	5,35	6,31	8,36	6,02
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Bud	-	6,04	6,33	6,71	6,39
1.f. Hotel dan Restoran	-	7,10	9,03	7,64	6,99
1.g. Lainnya	-	5,35	8,06	3,31	0,98
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	-	6,75	8,31	8,86	8,18
3. Konsumsi Pemerintah	-	7,98	6,93	7,01	5,67
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-	6,77	6,76	6,92	7,69
4.1. konstruksi	-	5,18	5,50	8,60	9,73
4.2. Non konstruksi	-	9,47	8,77	4,12	4,71
5. Perubahan Stok	-	16,80	8,09	9,61	(1,49)
6. Ekspor	-	4,24	8,12	3,02	5,81
7. Impor	-	3,61	8,21	5,93	5,63
Produk Domestik Regional Bruto	-	6,50	6,63	5,28	6,03

ket : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH
Komp. Perkantoran Pemkab Bangka Tengah
Jl. Raya Bypass, Koba 33181 Telp. (0718) 7362084, Fax. (0718) 7362085
E-mail : bps1904@bps.go.id

ISBN 978-602-0966-20-5



9 786020 966205 >

<http://bangkatengahkab.bps.go.id>